

MODUL PENDIDIKAN KAMPUNG

Belajar Bersama Bertindak Setara

MODUL PENDIDIKAN KAMPUNG

Belajar Bersama Bertindak Setara

**MODUL PENDIDIKAN KAMPUNG:
BELAJAR BERSAMA BERTINDAK SETARA**

**Tim Penyusun Modul Sajogyo Institute
2022**

Modul Pendidikan Kampung: Belajar Bersama Bertindak Setara

Tim Penyusun Modul Sajogyo Institute

2022

Tata Letak : Ridlo Ilwafa
Sampul dan Ilustrasi : Ridlo Ilwafa
Pemeriksa Aksara : Tim Penyusun Modul

Cetakan pertama, Desember 2022
i + xi + 165 halaman, 17,6 x 24,8 cm

Sajogyo Institute

Jalan Malabar No. 22, RT. 5/RW.07

Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor, 16151

www.sajogyo-institute.org

DAFTAR ISI

VI

Kata Pengantar

X

Pengantar Modul

BAHAN BACAAN FASILITATOR

3

1.1. Kapitalisme dan Krisis Sosial-Ekologi

32

1.2. Ekonomi Politik Kebijakan Energi

51

1.3. Pendidikan Kritis: Metode Bagi Pengorganisasian Rakyat

PANDUAN PROSES BELAJAR

77

2.1. Hadap-Masalah: Ruang Hidup

2.1.1. Bersama Memeriksa Ruang Hidup

2.1.2. Hubungan Sosial dalam Ruang Hidup

2.1.3. Bersama Membuat Rencana Kampung

113

2.2. Hadap-Masalah: Gerakan Rakyat

2.2.1. Memahami Tipologi Gerakan dan Membangun Organisasi Rakyat

2.2.2. Membangun Organisasi yang Demokratis

2.2.3. Strategi Membangun Gerakan

141

2.3. Hadap-Masalah: Energi dan Perampasan Lahan

2.3.1. Seluk Beluk Masalah Energi

2.3.2. Memahami Perampasan Lahan

KATA PENGANTAR

Bermula dari perjumpaan kita pada berbagai krisis yang dengan mudah ditemui di banyak titik. Dari satu kampung, kampung kota, hingga kota itu sendiri, dimana hampir semua ruang mengalami situasi yang sama. Beberapa di antaranya mengupayakan pembalikan, menahan laju kehancuran, mengupayakan solidaritas, dan lebih banyak lagi yang menerima kekalahan seperti sesuatu yang sudah terberi. Yang terakhir sepertinya contoh sukses *hegemoni* rezim bekerja dengan melakukan penundukan jauh sebelum hak-hak mereka dirampok. Dalam beberapa kesempatan, kami terlibat dalam pertemuan-peretemuan warga, konsolidasi, obrolan informal dengan orang-orang yang merelakan waktu dan pikiranya bersolidaritas pada gerakan warga. Topik yang selalu muncul adalah “*bagaimana membangun persatuan yang kuat?*”. Jawabannya tidak jauh dari kebutuhan akan organisasi, kepemimpinan, strategi dan taktik. Namun hal itu sepertinya selalu bisa dibikin dengan mudah. Obrolan berikutnya biasanya lebih reflektif: berbagai kelemahan dari gerakan mulai dibicarakan. Pada bagian ini akan muncul begitu banyak daftar kelemahan. Kesadaran bersama menjadi topik yang selalu diletakkan sebagai hambatan membangun gerakan yang kuat. Ide untuk menghidupkan kembali pendidikan kampung menjadi sebuah desakan yang diharapkan bisa membangun kesadaran bersama. Dari situlah kami dalam kesempatan ini mencoba mengambil peran. Modul ini adalah alatnya dan pendidikan kampung adalah cara kerjanya.

Kami menyadari bahwa krisis terjadi jauh lebih cepat dari upaya-upaya pemulihan yang direncanakan. Upaya pemulihan yang telah dilakukan berbagai gerombolan ini gemar menggunakan kosakata rumit nginternational. Hingga gerombolan ini akhirnya identik dengan kosakata serem dan cenderung meniru nada milisi-milisi bersenjata. Ya, jenis-jenis itu cenderung menjadi teror psikologis di kampung,

ketimbang menciptakan suasana bincang-bincang meyenenangkan bersama para orang biasa. Oleh karenanya, untuk tidak mengulangi kejadian di atas, tumpukan kertas ini kami bikin lebih sederhana. Dengan tujuan dapat menjangkau siapapun orang biasa, yang punya energi dan pikiran lebih untuk menjadi pembantu diskusi - belajar bersama di kampung. Tentu saja, dengan pilihan kata dan cara menggunakan yang tidak begitu rumit. Tidak lebih rumit ketimbang LKS siswa Sekolah dasar.

Sekali lagi, modul ini kami bikin untuk menjadi salah satu alat bagi pengorganisasian kerja gerakan. Modul ini panduan buat pegangan fasilitator untuk membantu proses diskusi bersama di kampung. Panduan pertanyaan-pertanyaan untuk memantik diskusi. Sehingga bisa menggairahkan kembali semangat orang biasa untuk berkumpul, bercerita, bersama-sama berefleksi, juga membicarakan bagaimana nasib kita dan ruang kampung kita menjadi lebih baik.

Isi modul yang akan anda baca di lembar berikutnya bukan jenis obat bodohrex 77 (supaya tidak menyebut satu merk obat sakit kepala yang terkenal), dengan cara kerja mengelabui saraf dan memalsukan rasa sakit. Juga tidak berisi aneka macam kata-kata magis seperti *gotong royong* yang berulang-ulang diucapkan oleh elit-elit kampung. Kata yang memiliki kekuatan mengerakkan sekelompok orang tanpa pamrih. Dimana kelompok elit kampung dengan kemampuan merapalkan mantra kebaikan bersama, mampu memperdaya energi kolektif kampung, untuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawab personalnya. Sebaliknya, alat ini berusaha memanggil kesadaran kritis yang dimiliki warga dengan caranya sendiri.

Dan menutup bagian ini, Sajogyo Institute dan rombongan belajar Malabar 22 berkomitmen kuat secara bersama-sama untuk ikut terlibat pendidikan kampung, atau mengadakan Sekolah untuk mereka yang dari kampung untuk kembali pulang ke kampung.

Ucapan terima kasih,

Atas kerjasama banyak orang, modul ini kami sebut telah layak disebarluaskan untuk memicu banyak gagasan hebat lainnya dan

tentu untuk terus dikembangkan. Terima kasih banyak, kalian semua telah terlibat dalam banyak proses, walau sebagian mungkin tidak mengetahui kapan dan dimana terlibat dalam membikin modul ini. Tapi kira-kira sejak dari pertemuan Bandung, Pantai Sawarna, hingga pertemuan di salah satu villa kecil di Bogor, villa mutiara, pertemuan #BI di Makara UI Depok, dan kedai kopi malabar 22. Di situlah gagasan itu dikumpulkan lalu ditulis menjadi modul. Sajogyo Institute dan para gelandangan malabar 22 tidak lebih dari panitia penulisan modul. Dengan begitu, modul ini tidak menjadi properti kami, tapi siapa saja boleh menggunakan dan mengembangkannya menjadi salah satu alat belajar bersama di kampung.

Maksum Syam

Direktur Eksekutif Sajogyo Institute

Isi modul yang akan anda baca di lembar berikutnya bukan jenis obat bodohrex 77, dengan cara kerja mengelabui saraf dan memalsukan rasa sakit. Sebaliknya, alat ini berusaha memanggil kesadaran kritis yang dimiliki warga dengan caranya sendiri.



PENGANTAR MODUL

Modul Pendidikan Kampung merupakan hasil belajar kami menekuni ekonomi politik energi dan industri kelistrikan. Pada 2020-2021 Sajogyo Institute melakukan studi untuk memahami bagaimana industri energi—utamanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan baku batu bara—diregulasi dan dikelola dan bagaimana krisis sosial-ekologis ditimbulkan oleh industri ini.

Industri kelistrikan menciptakan krisis sosial-ekologis dalam skala raksasa dari hulu-hilir rantai pasoknya. Di sektor hulu, pengerukan batu bara menghancurkan ruang hidup, menimbulkan konflik agraria, dan menyingkirkan masyarakat lokal. Di tapak pembangunan PLTU, industri ini melahirkan beragam kerusakan dan kehancuran tak kalah hebat. Pencemaran ekosistem laut, polusi udara, eksploitasi tenaga kerja, dan muncul penyakit-penyakit berbahaya. Syarat keselamatan rakyat dan syarat produktivitas rakyat mengalami kerusakan fatal hingga tak layak dihidupi.

Kami memahami industri kelistrikan, dan industri energi secara umum, merupakan tenaga utama (prime mover) untuk menopang perluasan reorganisasi ruang akumulasi kapital. Dengan keberadaannya, kawasan industri baru mungkin dibangun atau bahkan dipindah dengan mudahnya ke wilayah-wilayah dekat pembangkit listrik. Kita tahu, dalam proses pembentukan kawasan industri baru akan selalu melahirkan beragam cerita transaksi tanah melalui paksaan, penipuan dan teror dengan menggusur ruang hidup rakyat.

Modul Pendidikan Kampung juga hasil belajar bersama di simpul-simpul gerakan perlawanan rakyat, utamanya di wilayah industri energi. Kami menyaksikan perlawanan rakyat tak pernah padam. Pada situs-situs krisis, resistensi senantiasa muncul dalam beragam bentuk

dan kekhasannya. Rakyat bergotong-royong membangun solidaritas perlawanan melalui berbagai kreativitas, seperti membentuk organisasi dan menggalang aliansi, menggelar aksi protes dan melakukan advokasi serta kampanye.

Kami menyadari gerakan perlawanan ini memiliki tujuan purwa rupa. Gerakan untuk menolak dan menutup proyek pembangunan, hingga gerakan menciptakan perlindungan sosial dan aksi pemulihan krisis. Dinamika gerakan perlawanan di setiap situs krisis pun berbeda-beda. Faktor penentunya antara lain ialah kekuatan kuasa opresi yang dihadapi, bentuk struktur sosial masyarakat—apakah berdasarkan fragmentasi kelas atau relasi sosial lain, serta berbagai bentuk kepentingan aktor dan organisasi gerakan.

Belajar dari gerakan perlawanan rakyat di pusaran krisis sosial-ekologis itu, kami menyusun Modul Pendidikan Kampung. Kami menginsyafi bahwa kami membutuhkan perluasan dan pendalaman proses belajar. Pembesaran krisis secara intensif melahirkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban final tentang bagaimana membangun gerakan perlawanan untuk melakukan pembalikan krisis. Dengan demikian, kami merasa simpul-simpul ruang belajar bersama (bukan untuk) rakyat perlu ditumbuhkan dan diperluas. Ruang belajar sebagai simpul pengorganisasian rakyat melalui kerangka pendidikan kritis, berkeadilan dan demokratis.

Modul di genggaman Anda ini adalah panduan untuk membantu fasilitator di dalam ruang belajar bersama rakyat. Modul ini terdiri dari **dua bagian**, dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Pertama: Bahan Bacaan Fasilitator. Bagian ini berisi tiga bahan bacaan meliputi “Kapitalisme dan Krisis Sosial-Ekologis”, “Ekonomi Politik Kebijakan Energi”, dan “Pendidikan Kritis: Metode Bagi Pengorganisasian Rakyat”. Yang pertama dan kedua bertujuan mengkerangkai perspektif ekonomi politik dalam membahas krisis sosial-ekologis di bawah sistem kapitalisme, serta ekonomi-politik kebijakan energi di Indonesia. Yang terakhir bertujuan mengkerangkai metode Modul Pendidikan Kampung melalui pendidikan kritis partisipatif.

Bagian Kedua: Panduan Proses. Bagian ini berisi panduan dan instruksi teknis bagaimana mengelola dan memediasi proses belajar. Di dalamnya memuat tema-tema generik sebagai fokus proses belajar bersama. Tema-tema generik itu antara lain: (1) Bersama Memeriksa Ruang Hidup, (2) Hubungan Sosial dalam Ruang Hidup, (3) Bersama Membuat Rencana Kampung, (4) Memahami Tipologi Gerakan dan Membangun Organisasi Rakyat, (5) Membangun Organisasi yang Demokratis, (6) Strategi Membangun Gerakan, (7) Seluk Beluk Energi, dan (8) Memahami Perampasan Lahan.

Tentu saja modul ini memiliki keterbatasan. Modul ini bukanlah bahan ajar, melainkan rangkaian panduan proses belajar, dan lebih spesifik lagi, panduan pertanyaan. Sebagai buku panduan, modul ini tidak siap pakai ibarat resep masakan, dan masih sangat terbuka pada improvisasi teknis penerapan dan pada tema-tema apa pun yang muncul mengingat keluasan masalah di lapangan. Urutan tematik di dalamnya bukan alur tentang mana sebaiknya dipakai lebih dulu dan mana belakangan. Alurnya bisa sangat acak bergantung kebutuhan dan konteks lokal yang kami yakin sangat beragam. Selain itu, modul ini tidak membatasi penyelenggaraan proses belajar di ruang kelas dan sangat formal. Apa pun ia punya nama, katakanlah forum grup discussion atau pelatihan. Panduan dan instruksi teknis, lebih-lebih panduan pertanyaan di dalam modul ini, besar harapan kami untuk bisa luwes dipakai di obrolan kumpulan ibu-ibu, tongkrongan, pos ronda, dan aktivitas harian lain.

Demikian pengantar kami, modul ini terjemahan ke level sangat teknis atas adagium Prof. Sajogyo: “Belajar Bersama, Bertindak Setara.” Sehingga besar harapan kami supaya modul ini sangat membantu fasilitator memandu proses belajar bersama dan bertindak setara dengan rakyat.

Semoga modul ini bermanfaat.

Bogor, 12 Desember 2022

Tim Penyusun Modul

Bagian 1

BAHAN BACAAN FASILITATOR

An aerial photograph showing a massive industrial or mining operation. The landscape is heavily altered, with large-scale earthmoving, terracing, and the construction of numerous roads and structures. The terrain is dark and appears to be composed of soil or rock, with some areas showing signs of erosion or water runoff. The overall scene conveys a sense of large-scale human intervention in a natural environment.

“... akumulasi kapital dibangun di atas penghancuran basis dari semua kesejahteraan: manusia dan lingkungan alam.”¹

¹ Samir Amin dikutip dalam John Bellamy Foster and Brett Clark, *The Robbery of Nature: Capitalism and the Ecological Rift* (New York: Monthly Review Press, 2020), p. 142, <<https://search.ebscohost.com/login>> [accessed 2 May 2022].

1.1 KAPITALISME DAN KRISIS SOSIAL-EKOLOGI

Abdullah El-Hawie

Pendahuluan

Manusia memang sangat luar biasa, tidak punya sayap tapi bisa terbang, bahkan secara bersama-sama dalam jumlah banyak bisa menempuh jarak sejauh 11,842 km dalam waktu lebih kurang 8/delapan jam saja. Jarak antara Jakarta dan Jeddah di Saudi Arabia, yang biasa diterbangi oleh jamaah haji Indonesia ini, akan memakan waktu sebanyak 2,335 jam jika ditempuh dengan jalan kaki.² Di zaman Belanda, kaum muslim Indonesia harus menghabiskan waktu selama 40 hari di perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan kapal uap.

2 Angka-angka ini didapat dengan menggunakan Google Maps.

Kemampuan manusia dalam menaklukkan alam ini selalu mengalami kemajuan, jarak antara kemampuan satu dan kemampuan berikutnya bahkan semakin pendek dan perubahan kualitatif antara kemampuan satu dengan kemampuan berikutnya semakin luar biasa. Kemampuan yang luar biasa ini bisa juga kita lihat pada transformasi Batavia yang sederhana menjadi Jakarta yang rumit dan kemudian menjadi Nusantara super canggih; yang terakhir adalah nama kota baru yang akan dan sedang dibangun di Kalimantan Timur.

3

Kecanggihan lain dari kemampuan manusia dalam menaklukkan alam adalah perubahan kemampuan mentransformasi sepetak sawah yang tadinya hanya bisa menumbuhkan padi satu kali dalam satu tahun, sejak awal tahun 1970an, sawah-sawah di Indonesia bisa menumbuhkan padi dan atau palawija sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Bersamaan dengan itu pula, di atas sawah-sawah tersebut tumbuh kompleks perumahan, pabrik dan kawasan industri. Hari ini, sawah-sawah tersebut bisa menjadi medium bagi tumbuhnya bandara-bandara baru nan besar dan indah, jalan-jalan tol yang melingkar-lingkar yang menyesaki dan menghubungkan hampir semua daratan yang dulunya sangat subur ini.

Akhirnya, bukan sekedar sepetak sawah yang berubah, sekujur Pulau Jawa pun menjadi Pulau Jawa yang baru, sebuah pulau di mana hampir semua barang-barang yang memenuhi dapur, kamar dan ruang keluarga, kantor-kantor dan jalanan, diciptakan. Tuturan masyarakat kebanyakan menyebut hal ini sebagai ‘kemajuan,’ bahkan, paling tidak, begitulah para pekerja negara biasa menuturkannya.

Pada dasarnya, kemajuan selalu merupakan sesuatu yang kontradiktif di mana di dalam kemajuan selalu ada ketak-majuan, setiap penciptaan selalu merupakan penghancuran. Penciptaan sebuah kawasan industri selalu merupakan pelenyapan sawah-sawah yang adalah syarat produksi bahan pangan (beras) yang merupakan syarat manusia untuk hidup. Pembangunan kota baru selalu merupakan pembabatan hutan yang merupakan simpanan terbesar karbon, dan merupakan sesuatu yang paling penting bagi adanya oksigen di atmosfer hingga permukaan bumi ini layak dihuni oleh manusia.

4 Relasi dan Perubahan

Perubahan terus terjadi, hal dan kejadian-kejadian baru selalu dan terus berdatangan. Bagaikan air, “segala sesuatu mengalir, tak ada yang tetap”, demikian menurut Heraclitus, seorang filosof Yunani yang hidup pada lima abad sebelum masehi. Karena seluruh alam yang bisa kita jelajah, baik penjelajahan secara fisik maupun penjelajahan secara pengetahuan, adalah sebuah sistem, yaitu sebuah totalitas tubuh yang saling terhubung dari semua eksistensi material yang membentang dari bintang-gemintang sampai ke atom, bahkan sesungguhnya sampai pada partikel eter. Dalam interkoneksi tersebut, bagian-bagian pembentuknya bereaksi satu sama lain sebagai oposisi yang saling bertengan, dan reaksi inilah yang membentuk *motion*, perubahan dan perkembangan.³

Ilmu yang mempelajari *kesaling-terhubungan* ini disebut dengan dialektika. Dialektika, sebagai hukum perkembangan dan perubahan, dikembangkan secara detil oleh Hegel, yang di dalam tulisan-tulisannya, bagaimana pun, tampak sebagai sesuatu yang mistik. Adalah Marx dan Engels yang kemudian memberikan dialektika sebuah basis ilmiah, yaitu basis material tentang interkoneksi segala sesuatu,

3 Karl Marx and Friedrich Engels, *Marx & Engels Collected Works*, Engels (London: Lawrence & Wishart Electric Book, 2010), XXV.

termasuk hubungan antara cara berpikir dan menafsirkan dengan basis materialnya.⁴

4 Ted Grant and Alan Woods, *Reason in Revolt: Dialectical Philosophy and Modern Science*, North American ed. (New York: Algora Pub, 2002), I.

Dalam hal hubungan dengan pemikiran, Engels menjelaskan:

“Dialektika, ada yang disebut dengan dialektika objektif, yaitu yang berlaku di seluruh alam, dan ada yang disebut dengan dialektika subjektif, pemikiran dialektis, adalah refleksi dari gerakan melalui *opposites* yang nyata di mana-mana di alam, dan dengan konflik terus-menerus dari *opposites* dan perjalanan akhirnya menjadi satu sama lain, atau bentuk-bentuk yang lebih tinggi, menentukan kehidupan dari alam.”⁵

Engels menjelaskan bahwa dialektika ada yang disebut dengan dialektika objektif, yaitu hubungan relasi dan perubahan yang adalah kenyataan alamiah pada realitas materil. Ada lagi yang disebut dialektika subjektif, yaitu perubahan dan hubungan antar konsep dan kategori dalam berpikir. Selanjutnya, Engels juga menjelaskan bahwa kedua hal tersebut juga berhubungan secara dialektis di mana dialektika subjektif adalah refleksi dari dialektika objektif: gerakan perubahan di seluruh alam.

5 Marx and Engels, XXV, p. 492.

Perubahan itu terjadi pada kualitas. Dalam kasus perubahan sawah menjadi kawasan industri, bukan kualitas sawah yang berubah, tetapi sawah itu sendiri adalah kualitas yang kemudian berubah menjadi sebuah kualitas yang lain yaitu kawasan industri. Perubahan kualitas ini berhubungan dengan perubahan – bertambah atau berkurang – kuantitas. Sehamparan sawah tidak akan berubah menjadi sebuah kawasan industri jika semen yang ditumpahkan ke sawah hanya satu *sak*. Perubahan tersebut hanya mungkin terjadi ketika ada pengerahan uang, bahan, alat, energi, pengetahuan, dan kekuatan politik dalam kuantitas skala besar.

Di alam, dalam semua kasus, perubahan kualitatif hanya bisa terjadi jika terjadi penambahan atau pengurangan kuantitatif dari zat (*matter*) dan energi atau gerak (*motion*).⁶ Hukum ini berlaku pada skala yang sangat luas, dari partikel terkecil pada level sub-atom sampai pada fenomena yang paling luas sejauh yang bisa dicapai oleh pengetahuan manusia.⁷

6 Marx and Engels, XXV.

7 Grant and Wood, I.

Perubahan sebuah kualitas menjadi kualitas lain, selain dimungkinkan oleh hukum relasi antara kualitas dan kuantitas, juga dimungkinkan oleh dinamika internal yang saling berposisi di dalam kualitas tersebut. Terakhir, hubungan antara kualitas lama ke kualitas baru adalah hubungan yang disebut dengan *law of negation of negation*. Sehamparan sawah mendapatkan identitasnya sebagai sawah karena dia bukan kawasan Industri yang mana kawasan industri adalah bukan sawah. Sawah adalah bukan yang bukan dirinya. Sawah dan kawasan industri saling menggantikan dan pada dasarnya akan membawa pada perkembangan, dari sawah yang sederhana menjadi kawasan industri yang lebih rumit. Hukum ini

“mengekspresikan konsep perkembangan (development). Alih-alih sebagai sebuah siklus tertutup, ketika proses berulang, hukum ini menunjukkan bahwa gerakan melalui kontradiksi yang saling menggantikan pada dasarnya akan membawa pada perkembangan, dari sederhana menjadi rumit, dari rendah menjadi tinggi.”⁸

Dengan pemahaman seperti inilah paper ini akan mendiskusikan pada bagian-bagian selanjutnya tentang perubahan-perubahan sosial-ekologis. Untuk mendapatkan gambaran yang – mudah-mudahan – lengkap, tulisan ini akan memulai dari bentuk hubungan antara biosfera dan kehidupan.

8 Grant and Wood, I, p.43

Biosfera dan Kehidupan

Biosfera adalah lapisan terluar dari bumi yang memisahkan planet ini dari medium kosmik. Lapisan terluar ini menerima radiasi terutama dari matahari dalam beragam bentuk; cahaya, panas, atau elektrik, tergantung pada tipe dan panjang-gelombang.⁹

9 Vladimir I Vernadsky, *Biosphere* (Place of publication not identified: Copernicus Springer, 1998).

Karena radiasi tadi, zat yang ada di biosfera (*matter of biosphere*) mengumpulkan dan mendistribusikan energi surya (*solar energy*), dan mengkonversinya terutama menjadi energi yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan (*doing work*). Pada gilirannya, lapisan terluar dari permukaan bumi ini tidak saja region bagi *matter* saja, tetapi region dari energi dan sumber dari segala perubahan planet bumi. Karena itu, menurut Vernadsky “Biosfera pada akhirnya adalah kreasi dari matahari dan hasil proses-proses teresterial.”¹⁰

10 Vernadsky, *Biosphere*, p. 44

Pada proses teritorial ini, makhluk hidup memiliki peran yang sangat penting, kalau bukan yang paling utama, “adalah zat hidup – keseluruhan organisme hidup di bumi – yang mentransformasi radiasi energi dari matahari menjadi energi kimia aktif dari biosfera.”¹¹ Bahkan, bagi Vernadsky, *living matter* adalah *transformers* yang menggunakan energi surya dalam men-tenaga-i hubungan metaboliknya dengan planet bumi dan pada akhirnya “kehidupan, dari sudut pandang geologis, adalah elemen dari biosfera.”¹²

Peran kehidupan dalam evolusi biosfera, atau ko-evolusi biosfera dan makhluk hidup dijelaskan oleh para ahli Sistem Bumi dengan mempelajari awal mula kemunculan kehidupan di muka bumi. Kehidupan pertama muncul pada suatu waktu setelah 4 juta tahun yang lalu, tidak diketahui kapan persisnya dan bagaimana, atau apa bentuk dari sel awal tersebut, karena proses-proses geologis telah menyingkapkan jejak-jejak yang bisa dipelajari. Kala itu, setiap makhluk hidup baru adalah sel mikroskopik dengan kulit-yang-bisa-menyerap yang memisahkan/membedakan organisme tersebut dengan lingkungannya, selain itu, ia juga adalah sistem genetik (DNA dan RNA) yang menyimpan informasi genetik yang memungkinkan ia mereproduksi dirinya sendiri, dan sistem metabolik yang mendapatkan atau memproduksi bahan dan energi yang diperlukan untuk bertahan hidup. Sel ini disebut dengan prokariota, sebuah organisme bersel-tunggal dan tidak memiliki inti.¹³

Sel hidup ini membutuhkan masukan konstan akan nutrisi dan energi dan juga menghasilkan keluaran. Masukan dan keluaran ini adalah relasi metabolik yang memungkinkan sel tersebut untuk menghasilkan atau melahirkan ribuan sampai puluhan ribu molekul tertentu.¹⁴ Relasi metabolik ini menciptakan perubahan pada lingkungannya dengan menghilangkan beberapa bahan kimia dan melahirkan yang lain. Konsekuensinya adalah kemunculan evolusi biologis karena sel terpaksa beradaptasi atau mati di dalam kondisi-kondisi yang selalu berubah. Pada akhirnya, muncullah bentuk baru dari kehidupan.

Sejak 4,2 juta tahun yang lalu, “bakteri telah menemukan bentuk-bentuk metabolisme, termasuk beragam bentuk respirasi dan fotosintesis”.¹⁵ Fotosintesis adalah “inovasi metabolik yang paling

11 Vernadsky, *Biosphere*, p. 50.

12 Vladimir I Vernadsky, ‘The Evolution of Species And Living Matter’, *21st Century*, 2012, 13 (p. 34).

13 Ian Angus, ‘Five Revolutions: How Bacteria Created the Biosphere and Caused the First Climate Crisis’, *Climate & Capitalism*, 2018 <<https://climateandcapitalism.com/2018/04/17/five-revolutions-how-bacteria-created-the-biosphere-and-caused-the-first-climate-crisis/>> [accessed 2 October 2022].

14 Tyler Volk dalam Angus.

15 Nick Lane dalam Angus.

petnting dalam sejarah kehidupan di muka bumi.”¹⁶ Dengan menggunakan blok dasar bangunan kehidupan – carbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor dan sulfur - bakteri bersel-tunggal tadi menciptakan molekul-molekul baru yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan yang sangat beragam.¹⁷

16 Margulis dan Sagan dalam Angus.

17 Angus.

Organisme pertama mendapatkan energi dari reaksi kimia di laut di sekitar mereka. Akan tetapi, persediaan sangat terbatas dan tak bisa diandalkan. Bagi organisme yang sudah “belajar” menggunakan energi matahari, mereka terhindar dari kelangkaan dan bisa berkembang biak.¹⁸ Mikroba pertama menggunakan foton – unit energi elektromagnetik – untuk memecahkan molekul seperti hidrogen sulfida menjadi elemen dasar – hidrogen dan sulfur. Hidrogen adalah kombinasi dari CO₂ untuk membuat gula, dan sulfur digunakan untuk hal lainnya. Metode ini barangkali sudah digunakan oleh beberapa bakteri sejak 3,5 juta tahun yang lalu.

18 Angus.

8 Perubahan besar terjadi, pada suatu waktu antara 2,9 sampai 2,5 juta tahun yang lalu, ketika *cyanobacteria* mampu menangkap foton dari bagian energi dari spektrum matahari, dan menggunakannya untuk memecahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Kemampuan itu memberikan *cyanobacteria* hidrogen dan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang biak. Perkembang-biakan ini dimungkinkan oleh adanya lapisan Ozon yang menghalangi sinar ultraviolet yang mematikan, *cyanobacteria* bisa berkembang biak dan memproduksi oksigen yang semakin banyak.

Oksigen, sebagai gas reaktif, pada akhirnya berkombinasi (oksidasi) dengan bermacam elemen lain dan melahirkan 2/3 dari 4500 mineral yang sudah dikenal oleh manusia

“Mulai saat ini, organisme yang menggunakan atau menghasilkan oksigen mendominasi biologi. Memang, di permukaan bumi, hanya oksigen dan karbon dioksida yang cukup melimpah lah yang bisa memasok kebutuhan sel yang lebih besar dari beberapa mikron, dan oksigen pada akhirnya akan mencapai konsentrasi yang mampu mendukung organisme multiseluler besar. Mulai sekarang, Bumi menjadi dunia *kita*.”¹⁹

Senada dengan itu, para Ilmuan Earth System mengatakan

19 Andrew H, Knoll dalam Angus.

“Ilmuwan Sistem Bumi sekarang berpikir dalam kaitannya dengan evolusi gabungan kehidupan dan planet, menyadari bahwa evolusi kehidupan telah membentuk planet, perubahan lingkungan planet telah membentuk kehidupan, dan bersama-sama mereka dapat dipandang sebagai satu proses.”

Ko-evolusi kehidupan dan planet bumi sebagai suatu proses yang tunggal ditunjukkan dengan sangat baik oleh dua orang yang menamakan dirinya sebagai *dialectical biologist*; Richard Levins dan Richard Lewontin. Dengan menggunakan pendekatan materialisme dialektis, keduanya bisa membuktikan bahwa tidak akan ada organisme tanpa lingkungan, dan tidak ada lingkungan tanpa organisme, karena lingkungan adalah produk dari organisme sebagaimana organisme adalah produk dari lingkungan.²⁰

Ringkasnya, perubahan dan perkembangan biosfera adalah hasil dari hubungan biogeokimia yang ada dipermukaan bumi dengan relasinya dengan matahari sebagai sumber energi. Sebuah hubungan dialektis yang kemudian memungkinkan bumi untuk melahirkan dan menghidupi manusia.

20 Richard C. Lewontin and Richard Levins, *Biology Under the Influence: Dialectical Essays on Ecology, Agriculture, and Health* (New York: Monthly Review Press, 2007).

Manusia, Kerja, dan Alam

Spesies manusia adalah organisme yang juga punya hubungan metabolik dengan alam layaknya organisme yang lain, sebuah hubungan metabolik yang melaluinya perubahan dan perkembangan permukaan bumi terus berlangsung, bahkan dalam skala yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kemampuan manusia dalam mengelola dan mentransformasi bahan dan energi yang disediakan oleh alam telah sampai pada titik yang mengancam keselamatan manusia itu sendiri.

Sama dengan makhluk hidup lainnya, manusia secara esensial dikondisikan oleh hukum alam dan tunduk pada siklus fisiologis dari produksi, konsumsi, ekskresi ketika bernafas, makan dan buang kotoran. Perbedaannya terjadi ketika manusia mulai bisa memproduksi sendiri kebutuhan hidupnya dengan *kerja*. Kerja adalah

“... adalah proses antara manusia dan alam, sebuah proses yang dengannya manusia, melalui aksinya, memediasi, mengatur, dan mengontrol metabolisme antara dirinya dan alam.”²¹

Kerja adalah medium dari hubungan manusia dan alam yang dengannya manusia mengatur dan mengontrol hubungan tersebut. Ketika seorang manusia bekerja,

21 Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, 1976th edn (London: Pelican Books, 1976), I, p. 283.

“Dia menggerakkan gaya alamiah yang dimiliki oleh tubuhnya, lengan, kaki, kepala, dan tangan, dalam rangka mengambil bahan yang disediakan oleh alam dalam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan gerakan ini, dia beraksi terhadap alam eksternal dan merubahnya, dan dengan cara ini, secara bersamaan dia juga merubah karakter dirinya.”²²

22 Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, 1976th edn (London: Pelican Books, 1976), I, p. 283.

Berbeda dengan organisme lain yang berhubungan dengan alam secara naluriah, bagi manusia,

“Pada setiap akhir proses kerja, hasil muncul adalah sesuatu yang dipikirkan lebih dahulu oleh yang bekerja, karena itu sudah ada secara potensial. Manusia tidak saja mempengaruhi perubahan bentuk dari bahan-bahan yang disediakan oleh alam; dia juga merealisasikan tujuan kerja pada material itu. Dan ini adalah tujuan yang dia sadari, yang menentukan modus aktifitasnya dengan kekakuan sebuah hukum, dan dia harus menundukkan kehendaknya pada hukum tersebut.”²³

10

Ada tiga karakter kerja manusia yang membedakannya dengan seekor lebah. *Pertama* antisipasi, setiap mulai bekerja, manusia sudah mengantisipasi apa hasil yang akan keluar dari proses tersebut. *Kedua* intensionalitas, setiap mulai dan selama bekerja, manusia akan bekerja dengan intensi atau niat tertentu. *Ketiga refleksivitas*, setiap bekerja, manusia mampu merefleksikan apa yang ia lakukan dan mengapa ia melakukannya.²⁴

23 Marx, I, p. 284.

24 Michael Heinrich, *How to Read Marx's Capital: Commentary and Explanations on the Beginning Chapters* (New York: Monthly Review Press, 2021).

Dengan kerja, manusia menciptakan hubungan dengan alam dalam sebuah interaksi sadar dan bertujuan, sebuah interaksi yang memungkinkan manusia mentransformasi alam secara “bebas”, sungguhpun ketergantungan pada alam dan hukum alam bersifat tetap, karena manusia tidak bisa membuat syarat hidup (*means of subsistence*) dan syarat produktivitasnya (*means of production*) dari ketiadaan.²⁵

25 Kōhei Saitō, *Karl Marx's Ecosocialism: Capitalism, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy* (New York: Monthly Review Press, 2017)

Kerja sebagaimana yang sudah dijelaskan adalah aktivitas bertujuan dan instrumental, kerja juga memerlukan objek dan alat kerja. Objek

dan alat kerja ini disediakan oleh alam. Bahkan, alam itu sendiri adalah bahan dan alat kerja yang tanpa keduanya kerja tidak bisa direalisasikan. Objek kerja adalah bahan yang akan ditransformasikan oleh manusia dengan kerja menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan alat kerja adalah sesuatu, baik sederhana maupun rumit, yang mengantarai hubungan manusia dengan objek kerjanya. Untuk ini, manusia menggunakan sesuatu atau substansi yang memiliki properti mekanik, fisik dan kimiawi tergantung kebutuhan.²⁶

26 Marx, I.

Alat kerja dengan sifat-sifat seperti ini, yang disediakan oleh alam, menjadi organ dari aktifitas manusia sebagai tambahan bagi organ yang sudah melekat pada badannya; anggota tubuh. Dalam *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, Karl Marx menegaskan bahwa

“Alam adalah tubuh inorganik manusia – alam, yaitu, sejauh ia sebagai bukan tubuh manusia. Manusia hidup bergantung pada alam – artinya, alam adalah tubuhnya, yang dengannya dia harus selalu terhubung jika mau tetap hidup. Kehidupan fisik dan spritual manusia tersambung dengan alam berarti bahwa alam berhubungan dengan dirinya sendiri, karena manusia adalah bagian dari alam.”²⁷

11

Ini adalah kerja dan elemen kerja dalam makna dasar, sebuah konsep umum dan abstrak. Hal umum ini, dalam masing-masing bentuk masyarakat, akan mendapatkan bentuk partikularnya. Tujuan, objek, dan alat kerja tidak sama antara masyarakat tribal dan masyarakat perbudakan, begitu juga dengan masyarakat feodal dan masyarakat kapitalis seperti yang kita hidupi sekarang ini. Begitu juga dengan kemampuan kerja pada masing-masing bentuk masyarakat dalam mentransformasi alam menjadi sesuatu yang berguna tidak-lah sama. Dalam memproduksi kebutuhan hidupnya, seorang manusia selalu mengandaikan relasinya dengan manusia lain dalam sebuah kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Jadi, kerja, selain sebagai proses alamiah, ia juga adalah proses sosial. Marx menyebutkan bahwa

27 Karl Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, trans. by Martin Milligan, Great Books in Philosophy Series (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1988), p. 76.

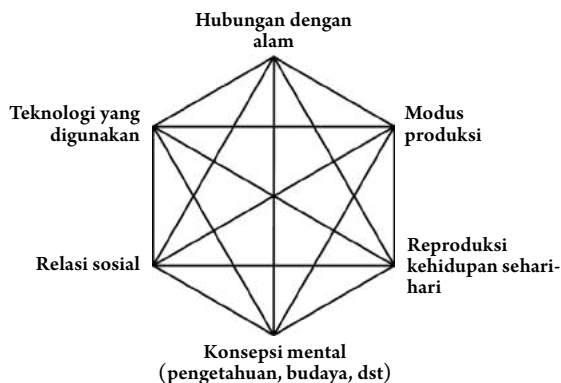
28 Paul Burkett, *Marx and Nature: A Red and Green Perspective* (St. Martin's Press, 1999), p. 29.

“dalam proses produksi, manusia bekerja tidak hanya terhadap alam, tetapi terhadap satu sama lain. Mereka – alam dan manusia – memproduksi hanya dengan kerja bersama-sama dalam sebuah cara tertentu dan secara timbal balik saling bertukar. Dalam rangka produksi, mereka masuk ke dalam sebuah relasi tertentu antara satu sama lain, dan hanya dalam relasi sosial itulah pengaruh mereka terhadap alam beroperasi, artinya, produksi itu terjadi”²⁸

Dalam rangka produksi dan reproduksi hidupnya, manusia harus masuk ke dalam relasi sosial dan berjuang untuk mengapropriasi alam dalam cara yang konsisten dengan relasi sosial dan pengetahuan mereka tentang alam. Dalam perjuangan ini, mereka mengembangkan hubungan dengan alam, mendapatkan pengetahuan baru dan kemudian mengembangkan organisasi sosial produksi yang juga baru. Sebuah organisasi sosial produksi tertentu kemudian akan memicu perkembangan perkakas kerja yang digunakan.

Dalam hubungannya dengan perkakas kerja ini, Karl Marx menjelaskan bahwa

“Teknologi mengungkap hubungan aktif manusia dengan alam, proses langsung produksi hidupnya, dan dengan itu ia juga menyingkat proses produksi relasi sosial, dan konsepsi mental yang lahir dari relasi tersebut.”²⁹



29 Marx, I, p. 493

12

Pada kutipan di atas, Marx menghubungkan enam elemen konseptual dalam satu kalimat: hubungan dengan alam, proses produksi, reproduksi kehidupan sehari-hari, relasi sosial dan konsepsi mental.³⁰

30 David Harvey, *A Companion to Marx's Capital* (London ; New York: Verso, 2010), I.

Masing-masing dari enam hal ini adalah momen dan relasi yang mempunyai dinamika internalnya sendiri, tetapi masing-masing dari enam hal ini juga saling berelasi satu sama lain berlawanan tapi saling memediasi. Keenam hal ini adalah determinan bagi kemampuan masyarakat tertentu dalam mentransformasi alam dan apa yang disediakan oleh alam menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu dikonsumsi secara langsung sebagai syarat hidup (*means of subsistence*) atau digunakan sebagai perkakas atau syarat produktivitas (*means of production*).

Komoditas, Uang, dan Kapital

Kapitalisme adalah salah satu bentuk partikular dari cara sebuah masyarakat memproduksi kebutuhan hidupnya. Masyarakat kapitalis memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam mentransformasi alam menjadi barang-barang. Hampir semua kebutuhan hidup manusia mampu dibuat, bahkan mampu membuat kebutuhan itu sendiri. Hingga tidak aneh, kalau kesejahteraan masyarakat kapitalis “nampak sebagai tumpukan besar komoditas.”³¹

31 Marx, I, p. 125.

Sama seperti produk hasil kerja pada makna umumnya, hasil kerja dalam masyarakat kapitalis adalah hasil kerja yang memiliki karakter fisik, kimia dan bentuk yang dalam satu dan lain hal bisa memenuhi kebutuhan tertentu hidup manusia. Hanya saja, di dalam masyarakat kapitalis, substansi natural dari produk ini adalah pembawa material (*material bearer*) dari nilai-tukar.³²

32 Marx, I.

Produk seperti disebut dengan komoditas, karena ia memiliki eksistensi ganda: sesuatu yang berguna dan sesuatu yang bisa dijual. Artinya komoditas diproduksi tidak untuk pembuatnya, tetapi untuk orang lain atau biasa disebut dengan pembeli. Ketika sebuah sepatu diproduksi di sebuah pabrik, pemilik pabrik tersebut tidak melihatnya sebagai sesuatu yang berguna, tetapi sebagai sesuatu yang bisa dia realisasi sebagai uang dengan cara menjualnya di pasar.

Uang adalah penyetara universal bagi nilai suatu komoditas, dan nilai harus melekat pada pembawa materialnya yaitu nilai-guna yang adalah substansi natural dari sebuah komoditas, karena tidak ada orang mau membeli barang tidak bernilai-guna. Sesuatu yang tidak berguna tidak bisa direalisasi sebagai uang.

Motif utama produksi bukanlah pemenuhan syarat hidup manusia, tetapi pengumpulan uang dan uang yang lebih banyak. Uang yang didapat kemudian dipakai lagi sebagai modal di proses produksi berikutnya, hasil produksi kedua ini kemudian dijual lagi ke pasar. Begitulah seterusnya. Produksi hanya untuk produksi lagi, pengumpulan uang hanya untuk pengumpulan uang hanya untuk mengumpulkan uang yang lebih banyak lagi.

Karena uang adalah penyetara universal dari nilai komoditas, dan nilai selalu melekat dengan kegunaan sebuah komoditas, sedangkan kegunaan sebuah komoditas adalah substansi natural dari barang tersebut, maka semakin banyak uang yang mau dikumpulkan semakin banyak pula proses transformasi bahan-bahan natural menjadi komoditas. Bahan-bahan natural dipergunakan baik sebagai objek kerja atau bahan mentah, atau sebagai alat produksi atau perkakas kerja atau sebagai energi yang dibutuhkan oleh motor penggerak perkakas-perkakas kerja berbasis mesin.

Mengikuti Marx, pemeriksaan terhadap bagaimana dan dengan cara apa produk hasil kerja manusia bertransformasi menjadi komoditas, komoditas kemudian bertransformasi menjadi uang haruslah dimulai dari pemeriksaan karakter komoditas itu sendiri.

“Adalah fakta sederhana bahwa komoditas memiliki eksistensi kembar, pada satu sisi sebagai sebuah produk yang bentuk natural eksistensinya secara ideal mengandung (secara laten berisi) nilai-tukarnya, di sisi lain sebagai dari nilai tukar jelmaan (uang), dalam mana semua relasi dengan bentuk natural dari produk dilucuti lagi – kembaran ini, eksisten yang terdiferensiasi kemudian berkembang menjadi sesuatu yang berbeda, perbedaan ini berkembang menjadi antitesa dan kontradiksi.”³³

14

Identitas sebuah produk sederhana dengan dirinya dibedakan dalam dua bentuk; (1) bentuk natural dari produk tersebut; dan (2) bentuk dari nilai-tukar. Ketika nilai tukar yang menjadi target pemilik komoditas direalisasikan sebagai uang melalui pertukaran, perbedaan imanen antara nilai-guna dan nilai-tukar mejadi oposisi eksternal antara komoditas dan uang.³⁴

Nilai tukar adalah relasi kuantitatif antara dua komoditas (kualitas) yang sedang dipertukarkan. Dua buah komoditas yang sedang dipertukarkan haruslah dua kualitas yang berbeda, atau dua komoditas dengan nilai-guna yang tidak sama. Akan tetapi, dua nilai-guna yang berbeda tersebut haruslah juga sama.

33 Karl Marx, *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*, trans. by Martin Nicolaus, Penguin Classics, 1973rd edn (London: Penguin books, 1993), p. 147.

34 Hiroshi Uchida, *Marx's Grundrisse and Hegel's Logic*, ed. by Terrell Carver (London; New York: Routledge, 2015) <<https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781317497844>> [accessed 5 July 2022]

“Dalam eksistensi naturalnya, dengan semua properti naturalnya, dalam identitas natural dengan dirinya sendiri, komoditas tidaklah selalu bisa dipertukarkan tidak pula bisa dipertukarkan dengan *semua komoditas*; ia hanya bisa dipertukarkan dengan sesuatu yang berbeda dari dirinya, sesuatu yang tidak sama dengan dirinya, sebagai nilai-tukar.”³⁵

Properti natural sebuah komoditas adalah nilai-guna yang didapat oleh seseorang dari alam melalui kerja. Di dalam masyarakat yang hubungan sosial-nya berbasis pada pertukaran, hasil kerja mereka tadi tidak lagi sekedar nilai-guna, tetapi “nilai-guna untuk orang lain”, atau nilai-guna sosial. Sebuah komoditas bukanlah sesuatu yang bernilai-guna bagi pemiliknya, ia adalah nilai-guna bagi orang lain. Karena itu, pemilik akan membawa komoditas yang ia miliki ke pasar untuk dipertukarkan.

35 Marx, *Grundrisse*, p. 142.

Pertukaran terjadi antara dua komoditas yang berbeda properti natural, tetapi dia haruslah sama pada aspek non-naturalnya, yaitu aspek sosial dari komoditas tersebut. Aspek sosial dari sebuah komoditas adalah bahwa komoditas tersebut adalah nilai-guna yang dihasilkan oleh kerja dengan tujuan menghasilkan nilai-guna untuk orang lain. Hasil kerja yang tidak berguna bagi orang lain bukanlah komoditas seperti dalam kasus hasil kerja yang dipergunakan langsung oleh pembuatnya. Sesuatu yang tidak punya atau bebas dari determinasi sosial seperti ini tidak bisa dipertukarkan. Ringkasnya, dua komoditas yang saling dipertukarkan haruslah dua komoditas dengan nilai-guna yang berbeda, tetapi keduanya haruslah sama-sama hasil dari kerja manusia (substansi sosial).³⁶

15

36 Uchida.

Seorang nelayan ketika dia membawa ikannya ke pasar, dia membayangkan akan mendapatkan beras sebagai komoditas yang bernilai-guna baginya, atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Karena pertukaran dilakukan berbasis pada substansi sosial dari ikan tadi, maka beras yang ia dapatkan adalah representasi material dari substansi sosial tadi, atau disebut dengan nilai-tukar. Sebuah komoditas yang mau dipertukarkan memiliki banyak kemungkinan nilai tukar yang tersedia, seluas pasar yang bisa dia akses. Kemungkinan tak berhingga ini kemudian “memaksa” munculnya sebuah komoditas tunggal yang menjadi penyetara universal dari nilai semua komoditas yang dibuat oleh suatu masyarakat. Komoditas tunggal inilah yang

disebut dengan uang.

Masyarakat pra-kapitalis sudah mengenal uang, hanya saja uang digunakan sebagai alat tukar atau sebagai medium sirkulasi nilai-guna. Ketika seseorang membuat lalu membawa produknya ke pasar, yang dia bayangkan adalah dia akan mendapatkan sejumlah uang, dan kemudian uang ia tukarkan (beli) dengan barang yang nilai-gunanya ia butuhkan. Artinya, di masyarakat para-kapitalis, tujuan dari produksi dan pertukaran adalah nilai-guna, bukan uang, karena uang yang didapat dari peristiwa penjualan akan digunakan kembali untuk membeli. Uang bukan tujuan, ia hanya sebagai medium pertukaran.

Sampai di sini, kontradiksi internal antara substansi natural dan substansi sosial dari sebuah komoditas menjelma menjadi kontradiksi eksternal antara komoditas dengan uang. Kontradiksi yang terakhir ini kemudian mentransformasi uang menjadi Kapital. Akan tetapi, produk hasil kerja tidak begitu saja menjadi komoditas, komoditas tidak secara otomatis bertransformasi menjadi uang, dan uang tidak serta-merta adalah kapital.

16

Sistem produksi kebutuhan hidup seperti ini berbasis relasi sosial tertentu, sebuah relasi sosial yang disebut dengan relasi-kapital atau relasi sosial kapitalis. Relasi sosial kapitalis adalah sebuah relasi yang muncul dengan pemusnahan hubungan langsung manusia dari syarat-syarat produksi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini, terutama adalah tanah. Artinya, kontrol terhadap hubungan metabolik manusia dan alam diambil alih kapital. Pelenyapan ini, dalam sejarah, adalah peristiwa perampasan tanah dan pengusiran orang-orang yang hidup di atas dari tanah tersebut. Tanah yang sudah dirampas kemudian bertransformasi menjadi sarana produksi (alat, bahan mentah, energi), dan mereka yang terusir bertransformasi menjadi pekerja upahan.

“Proses itu, karena itu, yang menciptakan relasi-kapital adalah tidak lain dan tidak bukan proses yang memisahkan pekerja dari kepemilikan akan syarat-syarat kerjanya; itu adalah sebuah proses yang melangsung dua transformasi, yang dengannya syarat hidup dan syarat produktivitas dirubah menjadi kapital, dan produsen langsung dirubah menjadi pekerja-upahan.”³⁷

37 Marx, I, p. 874.

Buruh upahan adalah manusia yang sudah tidak memiliki syarat produksi kebutuhan hidupnya, yang tersisa untuk bertahan hidup hanya tenaga atau tenaga-kerja. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya jalan keluar adalah menjual tenaga-kerja tersebut kepada mereka yang menguasai alat-alat dan sarana produksi kebutuhan hidup. Inilah momen dari transformasi kerja menjadi komoditas yang diperjual-belikan di pasar tenaga-kerja.

Tenaga-kerja yang sudah terjual menjadi milik pembeli (pemilik alat produksi), sang pembeli ini kemudian menggunakan tenaga-kerja dengan cara menyuruh pemiliknya bekerja. Kerja yang tadinya adalah aktifitas kontrol dan medium bagi metabolisme manusia dengan alam, kini berada di tangan pembeli atau kelas kapitalis. Kapitalislah yang kemudian mengendalikan kontrol hubungan manusia dengan lingkungannya. Kapitalis-lah yang membuat perencanaan, apa yang mau dikerjakan bagaimana dan berapa lama bekerja, dan buruh wajib tunduk pada komando tersebut.³⁸

38 Marx, I.

Begitu segera setelah produksi dibangun di atas penciptaan *industriousness* universal, terciptalah sebuah sistem eksploitasi yang merata terhadap kualitas alam dan manusia, sebuah sistem yang menggunakan ilmu pengetahuan yang sama masif-nya dengan semua kualitas mental dan fisik, hingga seolah tidak ada hal yang lebih benar dan sah di luar siklus produksi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.³⁹

17

39 Marx, *Grundrisse*, p. 409.

Sejak saat itu, untuk pertama kalinya, alam menjadi murni sebagai objek bagi manusia, murni sebagai “sumber daya alam”; tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang punya sistem sendiri; dan penemuan teoretis akan hukum-hukum alam diakui sebatas tipuan hingga bisa ditundukkan pada kebutuhan manusia, baik sebagai syarat hidup (*object of consumption*) atau pun sebagai syarat produksi (*means of production*). Bersesuaian dengan kecenderungan ini, modal mendorong pelampauan atas pertimbangan-pertimbangan dan batas-batas sosial serta batas-batas ekologis. Ia destruktif terhadap semua ini, dan terus-menerus merevolusinya, meruntuhkan semua penghalang yang mengempung perkembangan *force of production*, penciptaan kebutuhan baru, pengembangan produksi serba guna, dan penjualan serta

eksploitasi alam dan manusia.⁴⁰

40 Marx, *Grundrisse*, p. 409.

Selisih antara kapital yang didapat setelah penjualan komoditas adalah nilai-lebih. Nilai lebih ini didapat dari tenaga-kerja di mana ketika tenaga-kerja ini digerakkan dalam bentuk kerja, kerja bisa menciptakan nilai yang lebih besar dari nilai tenaga-kerja. Semakin lama seorang buruh dipekerjakan di tempat kerja, semakin banyak pula nilai-lebih itu dihasilkan. Kelebihan ini tentu saja tidak akan menjadi milik buruh, tetapi milik kapitalis yang telah membeli tenaga-kerja buruh tersebut.

Seorang pemilik perusahaan tentu saja berkeinginan mempekerjakan seorang buruh selama mungkin, tetapi hal ini ada batasannya: batas-batas natural dan batas-batas sosial. Batas-batas natural adalah batas yang diberikan oleh kebutuhan natural seorang buruh untuk memulihkan tenaganya agar bisa berangkat kerja di hari berikutnya. Seorang kapitalis tidak mungkin mempekerjakan seorang buruh selama 23 jam sehari, yang artinya hanya menyisakan 1 jam untuk pemulihan di rumah. Tenaga-kerja yang diproduksi dalam satu jam tidak mungkin bisa dikonversi menjadi kerja (energi kinetik) selama 23 jam. Selain batas natural tadi ada batas sosial, buruh akan berserikat dan secara bersama-sama memperjuangkan hidup mereka untuk tidak terlalu lama berada di dalam pabrik. Inilah yang dilakukan oleh serikat buruh Inggris yang memperjuangkan Ten Hours Bill di pertengahan abad ke-19.

18

Perkakas, Mesin dan Jejaring Permesinan

Selisih antara kapital yang didapat setelah penjualan komoditas adalah nilai-lebih. Nilai lebih ini didapat dari tenaga-kerja di mana ketika tenaga-kerja ini digerakkan dalam bentuk kerja, kerja bisa menciptakan nilai yang lebih besar dari nilai tenaga-kerja. Semakin lama seorang buruh dipekerjakan di tempat kerja, semakin banyak pula nilai-lebih itu dihasilkan. Kelebihan ini tentu saja tidak akan menjadi milik buruh, tetapi milik kapitalis yang telah membeli tenaga-kerja buruh tersebut.

Seorang pemilik perusahaan tentu saja berkeinginan mempekerjakan seorang buruh selama mungkin, tetapi hal ini ada batasannya: batas-batas natural dan batas-batas sosial. Batas-batas natural adalah batas yang diberikan oleh kebutuhan natural seorang buruh untuk memulihkan tenaganya agar bisa berangkat kerja di hari berikutnya. Seorang kapitalis tidak mungkin mempekerjakan seorang buruh selama 23 jam sehari, yang artinya hanya menyisakan 1 jam untuk pemulihan di rumah. Tenaga-kerja yang diproduksi dalam satu jam tidak mungkin bisa dikonversi menjadi kerja (energi kinetik) selama 23 jam. Selain batas natural tadi ada batas sosial, buruh akan berserikat dan secara bersama-sama memperjuangkan hidup mereka untuk tidak terlalu lama berada di dalam pabrik. Inilah yang dilakukan oleh serikat buruh Inggris yang memperjuangkan Ten Hours Bill di pertengahan abad ke-19.⁴¹

41 Marx, I.

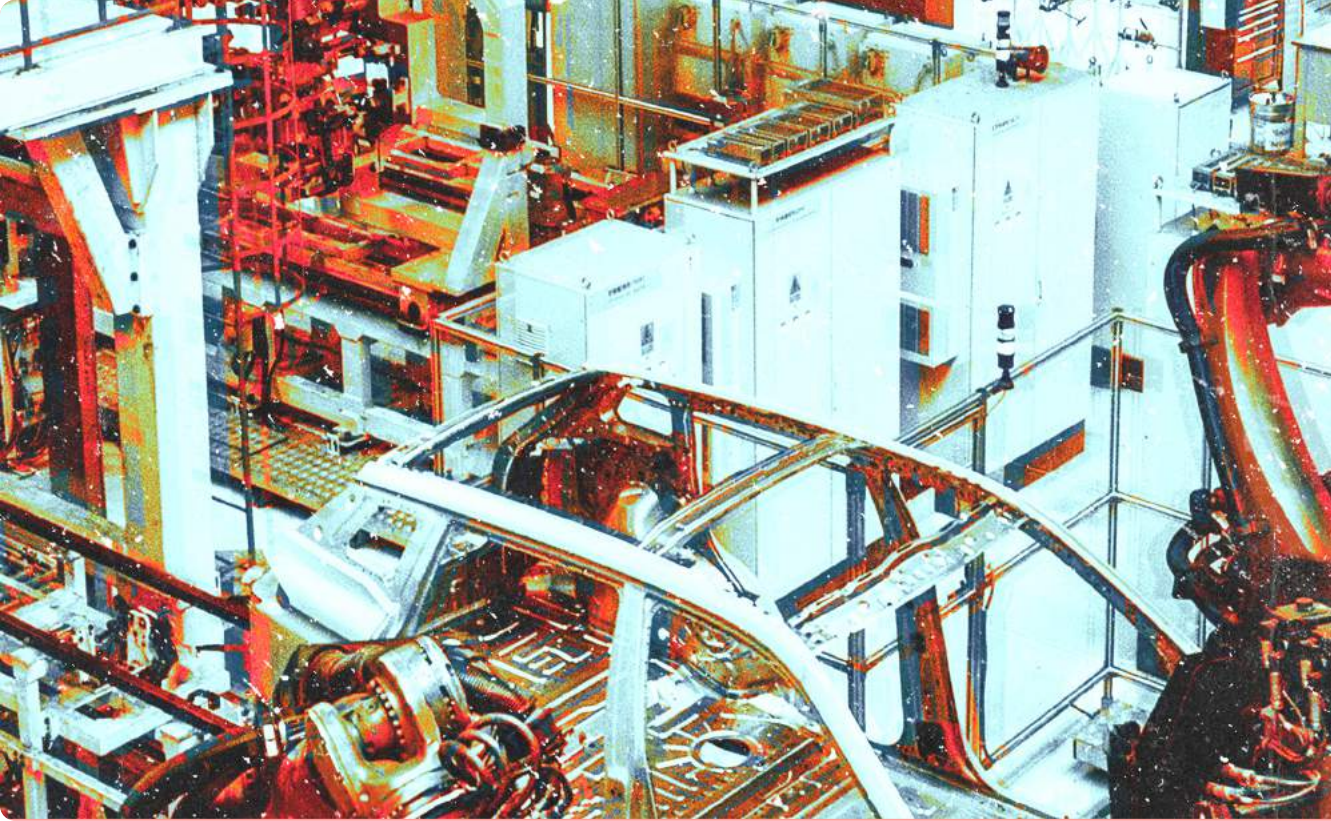
Terhadap batasan yang demikian, kapital memiliki cara lain, yaitu strategi peningkatan nilai lebih relatif, yaitu sebuah cara peningkatan nilai lebih dengan cara pengurangan nilai tenaga-kerja. Nilai tenaga-kerja adalah setara dengan nilai kebutuhan hidupnya, maka kapital perlu melakukan peningkatan produktivitas pada sektor industri yang memproduksi komoditas yang menjadi penentu bagi nilai tenaga-kerja, baik itu syarat normal ataupun penggantinya.⁴²

42 Marx, I.

Peningkatan produktivitas dilakukan dengan cara membesarkan kemampuan pekerja untuk mentraformasi bahan yang disediakan alam dengan cara mengerahkan pekerja dalam jumlah besar dan proses produksi dilaksanakan dalam skala yang bisa menghasilkan komoditas dalam jumlah yang sangat banyak. Pekerja dalam jumlah besar ini bekerja bersama, pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dalam rangka memproduksi komoditas yang sama di bawah perintah pengusaha yang sama.⁴³

43 Marx, I.

Inilah bentuk awal dari manufaktur yang pada dasarnya tidak bisa dibedakan dengan jelas dari pengrajin yang bekerja di gilda-gilda, hanya semacam sebuah bengkel yang diperbesar. Sungguhpun belum ada perubahan pada cara kerja, mempekerjakan buruh dengan cara seperti akan menciptakan revolusi pada kondisi objektif proses kerja. Bangunan tempat kerja, gudang bahan mentah, perkakas kerja dan



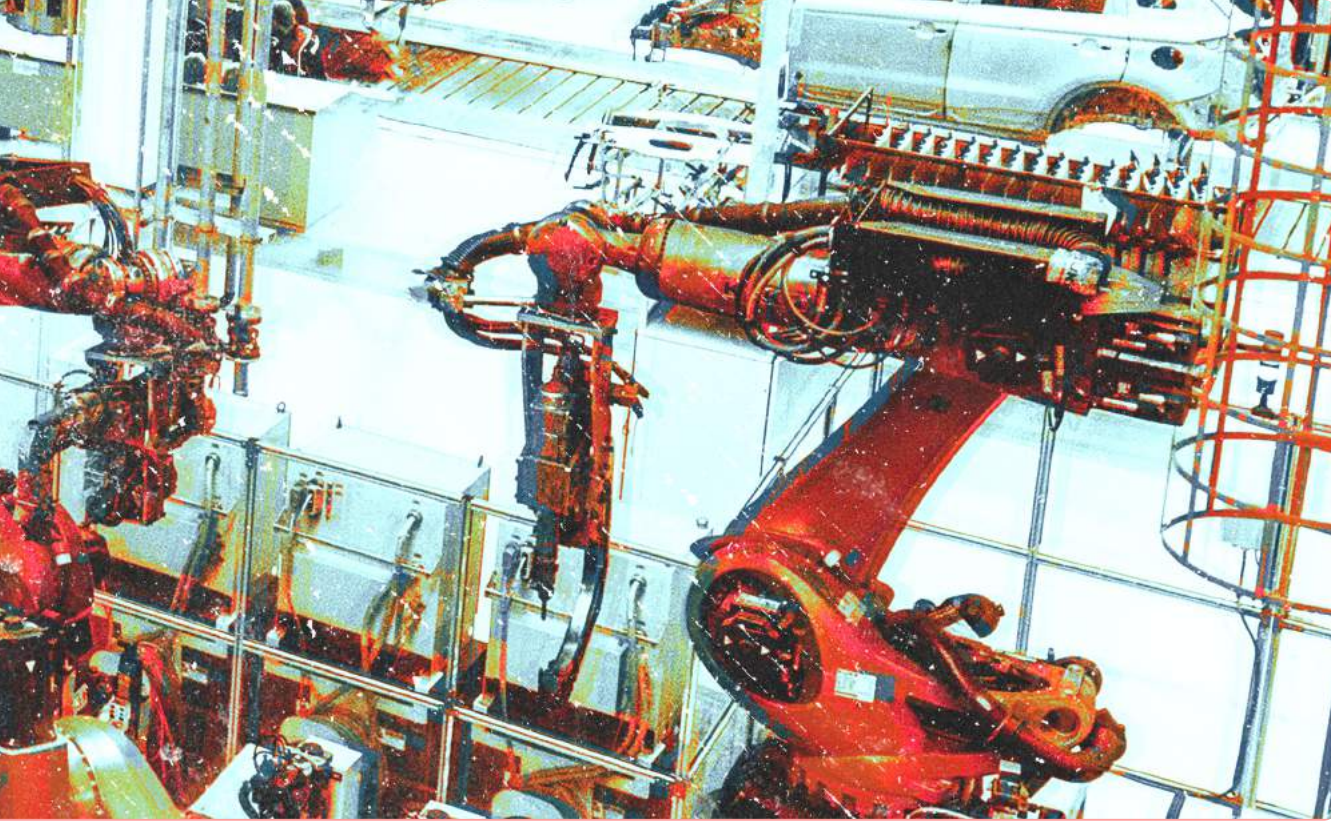
20

perlengkapan lain digunakan secara bersama-sama. Kondisi seperti akan meningkatkan penghematan pada pembangunan gedung dan penyediaan perkakas kerja, walaupun, pada dasarnya belum terjadi peningkatan nilai lebih. Penghematan dalam penggunaan sarana produksi bisa menguntukan karena dua hal. *Pertama*, sejauh ia bisa membuat komoditas yang dihasilkan menjadi murah, maka ia bisa menurunkan nilai tenaga-kerja. *Kedua*, sejauh ia bisa merubah rasio nilai lebih terhadap total kapital yang dibelanjakan.⁴⁴

44 Marx, I.

Keuntungan lain dari memperkerjakan buruh dalam jumlah walau belum melakukan perubahan cara proses produksi dilaksanakan adalah karakter natural dari kerja-bersama (co-operation) akan melahirkan kekuatan produksi yang baru. Kemampuan ini bukan sekedar penjumlahan total dari produktivitas masing-masing individu pekerja, tetapi entitas lain dari kekuatan produksi yang disebut *social productive power*. Karena kemampuan adalah karakter natural dari kerja bersama, maka pada dasarnya ini adalah anugerah gratis alam kepada kapital.⁴⁵

45 Marx, I.



“Titik tolak [mempekerjakan butuh dalam jumlah banyak] ini bertepatan dengan lahirnya kapital itu sendiri. Jika kemudian, di satu sisi, cara produksi kapitalis merupakan syarat historis yang diperlukan untuk transformasi proses kerja menjadi proses sosial, maka, di sisi lain, bentuk sosial dari proses kerja ini adalah metode yang digunakan oleh kapital untuk eksploitasi tenaga kerja dengan cara yang lebih menguntungkan, dengan meningkatkan tenaga produktifnya”⁴⁶

Dalam bentuk awal dan sederhana ini, masing-masing pekerja masih mengerjakan suatu produk dari awal sampai selesai, terkadang dengan satu atau dua orang *kenek*. Proses kerja yang seperti berubah segera setelah ada situasi eksternal yang mengharuskan seorang kapatalis untuk menyediakan komoditas dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu. Proses produksi sebuah komoditas kemudian dipecah-pecah menjadi tahapan yang terpisah, masing-masing proses dikerjakan oleh seorang pekerja, dan pada akhirnya berkembang menjadi sistem pembagian kerja yang sangat sistematis. Dalam sistem pembagian kerja seperti ini, sebuah komoditas yang tadinya adalah hasil kerja buruh individual menjadi hasil kerja sosial.⁴⁷

46 Marx, I, p. 453.

47 Marx, I.

Bukan saja ‘status’ komoditas yang mengalami perubahan, buruh-buruh yang mengerjakan satu proses yang sama secara berulang-ulang sepanjang hidupnya akan membentuk diri mereka masing-masing

menjadi sebuah tubuh yang bergerak secara otomatis dan menjadi 'perkakas' bagi proses yang menjadi tugasnya. Akhirnya, mereka hanya membutuhkan waktu yang semakin singkat dalam menyelesaikan keseluruhan proses tersebut. Serombongan buruh yang dipekerjakan dengan cara seperti ini akhirnya menjadi semacam mekanisme hidup (*living mechanism*) bagi manufaktur.⁴⁸

48 Marx, I.

22 Buruh yang makin terspesialis dan makin trampil pada gilirannya berkontradiksi dengan perkakas kerja yang ada. Kontradiksi ini kemudian diatasi dengan pembuatan perkakas baru yang lebih efektif. Bukan hanya itu, perkakas baru ini memiliki karakter mekanika yang bisa menyelesaikan satu proses pekerjaan dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Kala itu di Jerman, mereka membuat alat tenun yang bisa digerakkan oleh kaki dan tangan, hingga satu orang pekerja bisa menoperasikan dua alat tenun sekali jalan. Alat tenun dan cara kerja seperti sangat melelahkan. Peningkatan produktivitas dibatasi oleh organ tubuh yang dimiliki oleh manusia. Batasan terhadap peningkatan produktivitas seperti ini akhirnya diatasi dengan penciptaan sebuah alat tenun dengan dua roda-tenun yang bisa menggulung dua utas benang sekali digerakkan. Perkakas yang semakin canggih ini pada dasarnya sudah mendekati mesin, atau paling tidak bisa disebut dengan mesin sederhana. Perbedaan perkakas ini dengan mesin hanya pada mekanisme penggerakannya, yaitu tenaga-kerja manusia.

Keterbatasan tenaga-kerja yang bisa diperas dari seorang buruh kemudian menjadi masalah bagi perkakas yang lebih canggih. Masalah ini kemudian diatasi dengan penciptaan perkakas kerja yang digerakkan oleh energi selain tenaga-kerja. Pada tahun 1735, John Wyatt mengumumkan mesin tenun buatannya yang digerakkan oleh seekor keledai, mesin tenun ini kemudian menjadi penanda bagi revolusi industri abad 18.⁴⁹

49 Marx, I.

Semua mesin yang sudah dikembangkan secara sempurna, secara umum, memiliki tiga bagian esensial, mekanisme motorik, mekanisme transmisi, dan mekanisme kerja. Mekanisme motorik bertindak sebagai gaya penggerak bagi keseluruhan mesin. Ia bisa membangkitkan energinya sendiri seperti mesin uap, atau ia menerima gaya dari sesuatu yang tersedia di alam, seperti kincir-air yang menerima

energi dari air terjun, atau kincil-angin yang menerima energi dari gerakan udara. Mekanisme transmisi mengatur energi gerak, kalau perlu mengubah bentuknya dari gerakan linier menjadi gerakan sirkuler, membagi-bagi dan mendistribusikannya ke mekanisme kerja. Mekanisme kerja kemudian bergerak terhadap objek kerja dan memodifikasinya menjadi produk sesuai yang dikehendaki.⁵⁰

50 Marx, I.

Mesin mengalami perkembangan ukuran dan jumlah perkakas kerja yang ia gerakkan semakin banyak, maka dibutuhkan mekanisme motorik berkekuatan besar untuk menggerakkannya. Semua mekanisme motorik yang diwarisi dari era manufaktur, kuda adalah yang paling buruk, sebagian karena kuda punya kepala sendiri, sebagian lagi karena kuda lebih mahal sementara pemakaiannya di dalam pabrik sangat terbatas. Angin sangat tidak konstan dan tak bisa dikontrol. Sementara tenaga air, lebih banyak lagi masalahnya. Aliran air tidak bisa ditingkatkan sekehendak-hati, di musim-musim tertentu debit air berkurang atau membeku, dan lebih dari segalanya, kekurangan air yang paling utama adalah dia berada di lokasi tertentu dan tak bisa dipindahkan.

23

Batasan-batasan ini belum sungguh-sungguh teratasi sampai penemuan kedua James Watt yang disebut dengan *double-acting steam engine*, sebuah mekanisme motorik yang bisa memproduksi energi sendiri dengan menggunakan air dan batu bara. Kelebihan dari mesin ini adalah dia sepenuhnya bisa dikontrol, bisa dipindahkan dengan lokomotif, dan bisa dibangun dan digunakan di wilayah urban. Di dalam dokumen patennya yang keluar pada tahun 1784, spesifikasi mesin ini dijelaskan sebagai sesuatu yang bisa diaplikasikan secara universal di industri apa pun.⁵¹

51 Marx, I.

Ketika satu mekanisme motorik berkembang dan mampu menggerakkan banyak mesin sekaligus, dan mekanisme transmisi berkembang pesat, sebuah mesin hanya salah satu elemen dari sistem produksi berbasis permesinan, seperti yang terjadi pada sebuah pabrik tenun yang terdiri dari sejumlah alat tenun-listrik, dan sebuah pabrik pakaian yang terdiri dari sejumlah mesin-jahit dimana keduanya berada dalam satu bangunan. Selain berada dalam satu gedung, kedua sistem permesinan dengan produk yang berbeda itu menyatu

dalam sebuah kesatuan teknis, semua mesin menerima, secara bersama-sama, energi dari mekanisme motorik yang sama. Energi ditransmisi ke masing-masing mesin oleh mekanisme transmisi yang juga dipakai bersama-sama. Tentu saja, medium transmisi kemudian, di titik tertentu, dicabangkan ke masing-masing mesin.

Permesinan pada akhirnya melambungkan *productive force* manusia, kecepatan dan volume transformasi bahan dan energi yang disediakan oleh alam. Tidak hanya itu, *productive force* dipahami tidak bisa sebatas proses penciptaan nilai-guna, karena kapital bukan-lah sistem produksi yang berbasis pada produksi nilai-guna, tetapi produksi nilai dan nilai lebih. Nilai-guna hanya diproduksi sejauh ia mengandung kerja abstrak manusia yang ekspresi materialnya adalah uang. Karenanya, *productive force* yang mengalami peningkatan harus juga dilihat dalam pengertian kemampuan transformasi bahan dan energi yang disediakan oleh alam sebagai peningkatan kemampuan akumulasi kapital.

24

Akumulasi Kapital, Bahan dan Energi

Tanpa berniat untuk mengabaikan proses perkembangan *productive force* yang diceritakan sebelumnya dengan situasi mutakhir saat ini – yang pasti lebih canggih, dan untuk melihat bagaimana kebutuhan bahan dan energi dalam proses produksi kapitalis, ada baiknya kita melihat bagaimana sebuah telepon (selanjutnya kita sebut saja hp) pintar diproduksi.

Jika memegang sebuah hp, pertama-tama yang kita lihat adalah layarnya. Layar ini terbuat dari glass atau kaca. Kaca yang ada di sebuah hp bukanlah sembarang kaca, kaca ini begitu tipis dan tidak gampang pecah. Kaca ini terbuat dari **aluminium oxide** dan **silicon dioxide** serta dilapisi dengan **indium tin oxide** yang sangat tipis.⁵²

Selain bagian layar, sebuah handphone mempunyai bagian *casing* yang menjadi wadah bagi komponen-komponen inti yang ada di bagian dalam. Wadah ini, kita sebut saja sebagai badan dari sebuah hp, terbuat dari beragam metal (logam). Yang paling banyak digunakan adalah **aluminium alloy**, suatu bahan yang sangat ringan untuk membuat

52 Wagner Nancy, 'What Materials Are Used to Make Cell Phones?', *Techwalla* <<https://www.techwalla.com/articles/what-materials-are-used-to-make-cell-phones>> [accessed 3 May 2022].

sesuatu yang selalu dibawa ke mana-mana.

Aluminium oxide adalah **bauxite** yang telah dimurnikan menjadi bijih aluminium.⁵³ Selain untuk membuat kaca (layar hp) aluminium juga bisa dicampur dengan logam (*copper, zinc, magnesium, manganese or silicon and the addition of small amounts of zirconium, hafnium or scandium*) agar menjadi lebih keras.

53 Australia, 'Aluminium', 2018 <<https://www.ga.gov.au/education/classroom-resources/minerals-energy/australian-mineral-facts/aluminium>> [accessed 3 May 2022].

Di bagian dalam ada baterai, sirkuit dan sistem perkabelan. Baterai terbuat dari **lithium cobalt oxide** dan **carbon graphite**. Adapun sistem perkabelan terbuat dari emas, tembaga dan perak. Sementara papan sirkuit terbuat dari **platinum** dan **tungsten**. Agar lebih murah dan tidak gampang rusak, bagian-bagian yang terbuat dari metal kadang juga terbuat dari plastik. Plastik tersebut dibuat dari bahan-bahan seperti **cellulosa, coal, natural gas, salt** dan **crude oil** melalui sebuah proses yang disebut dengan **polymerisation** atau **polycondensation**.⁵⁴

54 *Ibid*

Lebih dari separuh cobalt di dunia ini berasal dari pertambangan-pertambangan yang ada di Congo, yang 20%-nya adalah tambang artisan di mana pekerjaannya tidak terikat dengan perusahaan apa pun, mereka hanya membongkar lalu menjual hasilnya ke perusahaan pembeli. Pada tahun 2016, Amnesty International melaporkan bahwa pertambangan cobalt di Congo mempekerjakan buruh anak (berumur 7 tahunan) dalam kondisi kerja yang sangat buruk. Para pedagang membeli cobalt dari anak-anak ini dan kemudian menjualnya ke sebuah perusahaan bernama Congo Dongfang Mining, anak dari Zhejiang Huayou Cobalt, sebuah perusahaan terdaftar di Cina. Perusahaan ini menjual cobalt ke tiga perusahaan pembuat baterai di Cina, Jepang dan Korea Selatan. Tiga perusahaan ini menjual baterai yang dihasilkan kepada Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler dan Volkswagen.

Anak-anak penambang cobalt ini menghadapi resiko penyakit berjangka panjang dan resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Pada september 2014 dan Desember 2015, paling sedikit ada 80 penambang mati di bawah tanah. Amnesti International juga melaporkan bahwa para pekerja ini bekerja dalam waktu yang sangat panjang

tanpa alat perlindungan diri yang memadai, seperti sarung tangan dan masker. Anak-anak ini bekerja selama 12 jam sehari, memikul beban yang sangat berat hanya untuk mendapatkan satu atau dua dolar dalam sehari. Pada tahun 2014, ada sekitar 40.000 pekerja anak di seluruh Congo, semuanya adalah penambang Cobalt.⁵⁵

Untuk membuat sebuah HP, sebuah perusahaan tidak memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan. Kita ambil iPhone sebagai contoh, Apple membeli komponen-komponen yang dibutuhkan dari lebih dari 200 penyalur dan kemudian menjualnya kepada sebuah perusahaan Taiwan yang akan merakitnya, yaitu Foxconn yang berbasis di Cina. Di Zhengzhou, Foxconn memiliki 5,7 km² dan mempekerjakan 350.000 buruh yang rata-rata diupah sebesar 2,54 dolar/jam. Dengan 94 line produksi yang dimiliki, Foxconn merakit sebuah iPhone dalam sekitar 400 tahap, termasuk penyemiran, solder, pembuatan lobang dan pengepasan baut. Dalam satu hari, pabrik ini bisa menghasilkan 500.000 iPhone. Setelah perakitan iPhone selesai, Foxconn menjualnya kepada Apple yang, pada akhirnya, akan menjual ke seluruh dunia.⁵⁶

Perusahaan ini terlibat pada kekerasan terhadap buruh. Pada tahun 2010, banyak dari buruhnya melakukan bunuh diri dikarenakan beban dan kondisi kerja yang sangat buruk. Sungguhpun ada perbaikan, pada tahun 2015, Students and Scholars Against Corporate Misbehavior (SACOM) melaporkan bahwa upah buruh mengalami kenaikan tetapi terjadi pemotongan sepihak terhadap tunjangan-tunjangan. Selain itu, SACOM juga menemukan bahwa buruh dipaksa untuk bekerja lembur dan serikat buruh yang ada tidak berfungsi dengan baik.

Biasanya, para pembeli telepon seluler akan sangat memperhatikan kapasitas baterai dan kehematan energi yang dibutuhkan dalam penggunaan. Sesungguhnya, pengoperasian sebuah telepon seluler tidak membutuhkan banyak energi, sebuah iPhone 6 hanya membutuhkan 3,8 kWh dalam satu tahun.⁵⁷

Biasanya, para pembeli telepon seluler akan sangat memperhatikan kapasitas baterai dan kehematan energi yang dibutuhkan dalam

55 Amnesty International, "This Is What We Die for": Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt (London: Amnesty International, January 2016).

56 David Barboza, 'An Apple iPhone's Journey, from Chinese Factory Floor to Western Retail Store', *Australian Financial Review*, 2016 <<https://www.afr.com/technology/an-apple-iphones-journey-from-chinese-factory-floor-to-western-retail-store-20161230-gtjna>> [accessed 4 May 2022].

57 Alexis C. Madrigal, 'The Energy in Things', *The Atlantic*, 2014 <<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/the-energy-in-things/381557/>> [accessed 4 May 2022].

penggunaan. Sesungguhnya, pengoperasian sebuah telepon seluler tidak membutuhkan banyak energi, sebuah iPhone 6 hanya membutuhkan 3,8 kWh dalam satu tahun.⁵⁸ Berbeda dengan pemakaian, untuk proses penambangan, permurnian dan pembuatan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk sebuah telepon seluler, dibutuhkan sekitar 1 GJ (gigajoule), setara dengan 278 kWh, atau setara dengan energi yang dibutuhkan oleh sebuah telepon seluler untuk beroperasi selama 73 tahun. Pada tahun 2018, Apple menjual 217.000.000 iPhone. Dengan demikian, energi yang dibutuhkan untuk membuat 217 juta iPhone adalah 60.326.000.000 kWh (enam puluh ribu tiga ratus dua puluh enam gigawatt). Energi listrik sebanyak ini dihasilkan dari pembakaran batu bara sebanyak 245.227.642 ton (245 juta ton). Perlu diketahui bahwa pengerukan batu bara di Indonesia hanya sebesar 600 juta ton dalam satu tahun.

Komoditas yang dihasilkan – iPhone sebagai contoh – kemudian direalisasi menjadi uang di pasar. Uang dibelikan ke bahan dan energi yang diperlukan untuk proses berikutnya, begitulah tidak pernah berhenti. Bukan hanya itu, skala produksinya akan semakin meningkat. “Ketika skala produksi meningkat, begitu juga dengan bahan dan energi yang dibutuhkan dalam proses produksi.”⁵⁹ Karena bahan dan energi berasal dari elemen ekosistem yang dikeruk dengan tanpa batas dan tak berhingga, maka kemampuan bumi untuk menjadi tempat dan syarat kehidupan jatuh pada level krisis.

Penutup

Krisis adalah situasi genting yang membutuhkan tindakan segera, layaknya situasi seorang pasien yang hidupnya tidak akan tertolong tanpa ada tindakan medis sesegera mungkin. Krisis ini berwatak sosial sekaligus ekologis, karena ia adalah bentuk dari cara sebuah masyarakat berhubungan satu sama lain, dan cara mereka berhubungan dengan alam.

58 Alexis C. Madrigal, 'The Energy in Things', *The Atlantic*, 2014 <<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/the-energy-in-things/381557/>> [accessed 4 May 2022].

59 Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy*, Penguin Classics (London: Pelican books, 1978), II, p. 218.

Sungguhpun manusia bukanlah satu-satunya yang memicu perubahan pada biosfera, begitu juga kapitalisme bukanlah satu-satunya bentuk hubungan sosial produksi yang melakukan pengrusakan terhadap bumi, akan tetapi kontrol kapital terhadap hubungan metabolik manusia dengan alam telah menciptakan skala dan kecepatan krisis sosial-ekologis yang tak terpermanai.

Ketika kapital mengendalikan hubungan metabolik manusia dengan alam, maka produksi tidak lagi untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, akan tetapi untuk penciptaan uang yang lebih banyak bagi mereka yang menguasai sarana dan perkakas produksi.

Tepat di sinilah kontradiksi dasar di dalam kapitalisme terlihat, yaitu kontradiksi produksi dalam arti umum dengan produksi dalam pengertian partikular. Kontradiksi antara produksi untuk menciptakan barang yang berguna untuk kebutuhan manusia dengan produksi untuk akumulasi kapital. Dan krisis sosial ekologis adalah penampakan material dari kontradiksi tersebut.

Ketika skala produksi meningkat, begitu juga dengan bahan dan energi yang dibutuhkan dalam proses produksi.



Daftar Bacaan

- Amnesty International, *“This Is What We Die for”: Human Rights Abuses in the Democratic Republic of the Congo Power the Global Trade in Cobalt* (London: Amnesty International, January 2016)
- Angus, Ian, ‘Five Revolutions: How Bacteria Created the Biosphere and Caused the First Climate Crisis’, *Climate & Capitalism*, 2018 <<https://climateandcapitalism.com/2018/04/17/five-revolutions-how-bacteria-created-the-biosphere-and-caused-the-first-climate-crisis/>> [accessed 2 October 2022]
- Australia, ‘Aluminium’, 2018 <<https://www.ga.gov.au/education/classroom-resources/minerals-energy/australian-mineral-facts/aluminium>> [accessed 3 May 2022]
- Barboza, David, ‘An Apple iPhone’s Journey, from Chinese Factory Floor to Western Retail Store’, *Australian Financial Review*, 2016 <<https://www.afr.com/technology/an-apple-iphones-journey-from-chinese-factory-floor-to-western-retail-store-20161230-gtjnaf>> [accessed 4 May 2022]
- Burkett, Paul, *Marx and Nature: A Red and Green Perspective* (St. Martin’s Press, 1999)
- Grant, Ted, and Alan Woods, *Reason in Revolt: Dialectical Philosophy and Modern Science*, North American ed. (New York: Algora Pub, 2002), I
- Harvey, David, *A Companion to Marx’s Capital* (London ; New York: Verso, 2010), I
- Heinrich, Michael, *How to Read Marx’s Capital: Commentary and Explanations on the Beginning Chapters* (New York: Monthly Review Press, 2021)
- Lewontin, Richard C., and Richard Levins, *Biology Under the Influence: Dialectical Essays on Ecology, Agriculture, and Health* (New York: Monthly Review Press, 2007)
- Madrigal, Alexis C., ‘The Energy in Things’, *The Atlantic*, 2014 <<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/the-energy-in-things/381557/>> [accessed 4 May 2022]

Marx, Karl, *Capital: A Critique of Political Economy*, 1976th edn (London: Pelican Books, 1976), I

_____, *Capital: A Critique of Political Economy*, Penguin Classics (London: Pelican books, 1978), II

_____, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, trans. by Martin Milligan, Great Books in Philosophy Series (Amherst, N.Y: Prometheus Books, 1988)

_____, *Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy*, trans. by Martin Nicolaus, Penguin Classics, 1973rd edn (London: Penguin books, 1993)

Marx, Karl, and Friedrich Engels, *Marx & Engels Collected Works*, Engels (London: Lawrence & Wishart Electric Book, 2010), XXV

Nancy, Wagner, 'What Materials Are Used to Make Cell Phones?', *Techwalla* <<https://www.techwalla.com/articles/what-materials-are-used-to-make-cell-phones>> [accessed 3 May 2022]

Saitō, Kōhei, *Karl Marx's Ecosocialism: Capitalism, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy* (New York: Monthly Review Press, 2017)

Uchida, Hiroshi, *Marx's Grundrisse and Hegel's Logic*, ed. by Terrell Carver (London; New York: Routledge, 2015) <<https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781317497844>> [accessed 5 July 2022]

Vernadsky, Vladimir I, *Biosphere* (Place of publication not identified: Copernicus Springer, 1998)

_____, 'The Evolution of Species And Living Matter', *21st Century*, 2012, 13



1.2 EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN ENERGI

Syiqqil Arofat

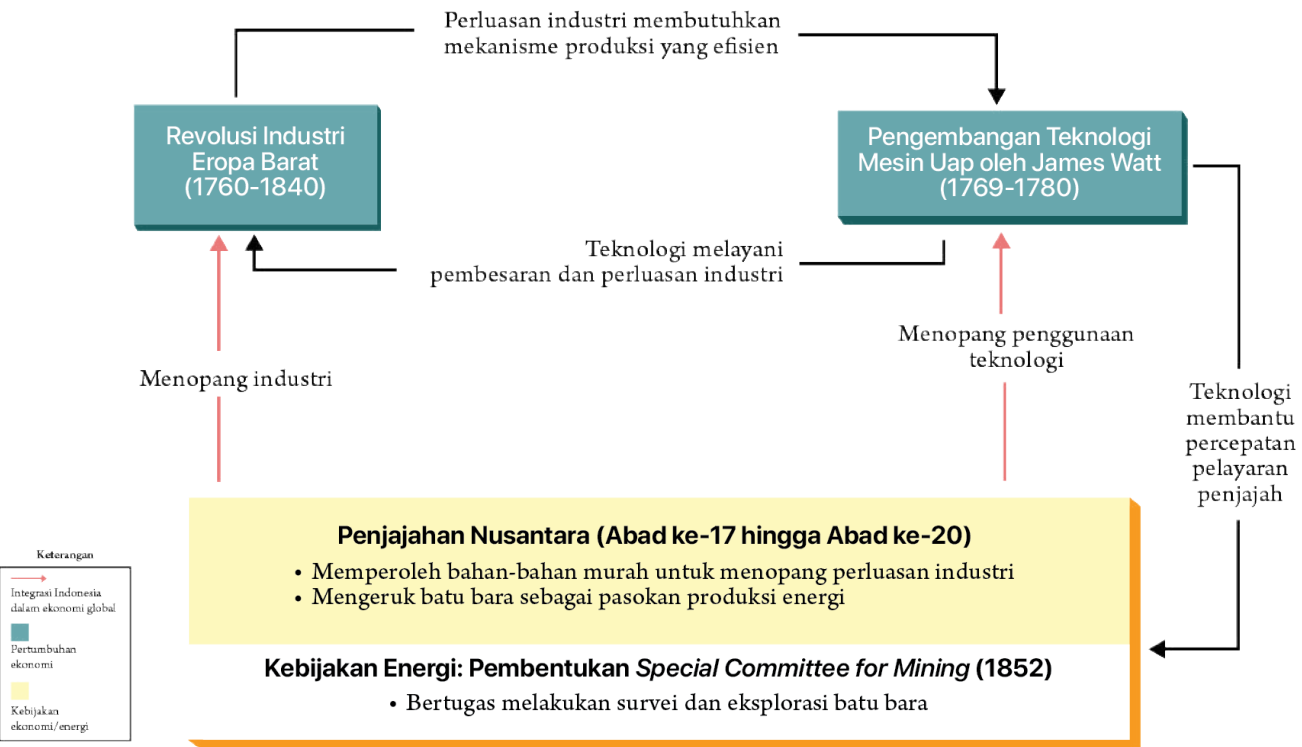
Kebijakan dan Teknologi Energi Melayani Industrialisasi

Kebijakan energi tidak dapat dilepaskan dari relasi-relasi ekonomi politik yang melingkupinya. Kebijakan tambang batu bara pertama di Hindia Belanda berkaitan erat dengan Revolusi Industri Eropa Barat, pengembangan teknologi mesin uap, dan dinamika penjajahan. Revolusi industri di Eropa sebagai momen genting dalam perkembangan sejarah—yang awalnya terjadi di Inggris pada sekitar tahun 1760-1840, lalu meluas ke berbagai negara di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang—tidak hanya menuntut peningkatan efisiensi produksi tetapi juga membutuhkan pasokan energi lebih besar.¹ Berbagai peningkatan efisiensi teknologi mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt pada sekitar tahun 1769-1780 berkontribusi pada pembesaran dan perluasan industri yang juga membutuhkan pasokan batu bara lebih besar. Pengembangan teknologi ini pula yang memungkinkan percepatan pelayaran penjajahan yang tentu juga mempercepat perputaran ekstraksi, produksi dan distribusi antara Hindia Belanda dan Eropa.

Kebutuhan terhadap batu bara sebagai bahan pasokan produksi energi untuk perluasan industri Eropa mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk mencari dan menemukan bahan batu bara, yang beroperasi pertama kali di Pengaron Kalimantan Selatan pada tahun 1848. Namun demikian, Semakin tingginya kebutuhan pasokan energi batu bara pada tahun 1850-an mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk semakin gencar memperluas penambangan batu bara, serta mengembangkan kebijakan untuk menopang kebutuhan perluasan industri tersebut. Pada tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda membentuk *Special Committee for Mining*—kemudian berubah menjadi *Colonial Mining Office*—yang bertugas melakukan survei dan eksplorasi geologis deposit batu bara.²

1 Erman (1999), dikutip dalam Working Paper Sajogyo Institute “Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan” (Yanuardy dkk. 2022)

2 Devi dan Prayogo (2013), dikutip dalam Working Paper Sajogyo Institute “Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan” (Yanuardy dkk. 2022)



Artinya, kebijakan tambang batu di masa penjajahan tidak dapat dipahami tanpa menelusuri dinamika dan relasi-relasi historis, baik di tingkat global dan nasional, yang melatari pembentukan kebijakan tersebut. Kebijakan energi pemerintah Hindia Belanda berperan sebagai penopang kebutuhan pengembangan dan perluasan industri Eropa.

Bagan 1. Revolusi Industri, Teknologi, dan Kebijakan Energi

Kebijakan dan Produksi Energi Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Tidak cukup memperluas industri di Eropa, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan liberalisasi kebijakan ekonomi, yang ditandai dengan kebijakan Agrarische Wet pada 1870. Kebijakan ini memuluskan perusahaan swasta Eropa untuk memperluas penguasaan ekonomi di sektor perkebunan dan pertanian sekaligus meningkatkan ekspor di kedua sektor ini, yang karenanya menuntut pengembangan transportasi dan komunikasi, serta berkonsekuensi pada pertumbuhan kota-kota besar sebagai pusat-pusat ekonomi. Praktik perluasan, pembesaran dan

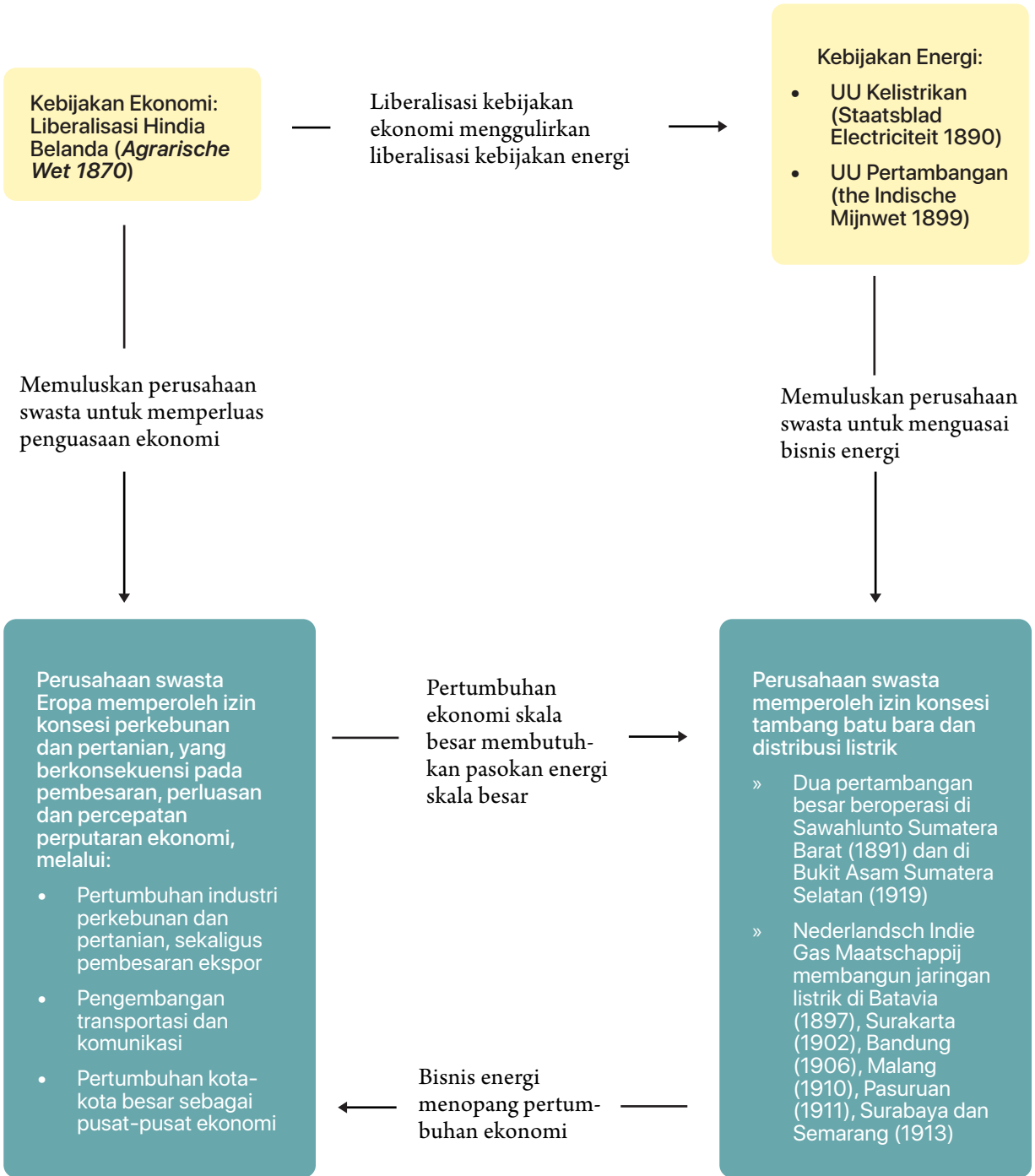
percepatan putaran ekonomi tersebut tidak dapat terjadi tanpa adanya pembesaran pasokan energi, yang juga ditopang oleh pengembangan teknologinya, baik di sektor tambang, produksi dan distribusinya.

Di tengah laju liberalisasi ekonomi ini, liberalisasi kebijakan energi juga dilakukan agar pasokan energi juga mampu menopang pesatnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan liberalisasi kebijakan energi, baik dalam distribusi listrik melalui undang-undang kelistrikan (Staatsblad 1890 No. 190 Electriciteit) pada 1890 maupun di sektor penambangan batu bara melalui undang-undang penambangan (the Indische Mijnwet) pada 1899, yang menetapkan sekaligus memuluskan pemberian konsesi tambang batu bara dan distribusi listrik bagi warga negara Belanda, warga Hindia Belanda atau perusahaan-perusahaan yang berada di bawah hukum Belanda atau Hindia Belanda.³

3 *Ibid.*

Dalam rentang liberalisasi ekonomi dan energi ini, dua pertambangan besar mulai beroperasi, yaitu: pertambangan Ombilin, Sawahlunto Sumatera Barat yang mulai beroperasi sejak 1891, dan pertambangan Bukit Asam di Sumatera Selatan yang mulai beroperasi sejak 1919. Sementara dalam jaringan listrik, Nederlandsch Indie Gas Maatschappij mulai menguasai dan mengembangkan bisnis energi melalui pembangunan jaringan listrik di Batavia (1897), Surakarta (1902), Bandung (1906), Malang (1910), Pasuruan (1911), Surabaya dan Semarang (1913).⁴ Artinya, industri energi yang ditopang oleh liberalisasi kebijakan energi berkembang sedemikian rupa sebagai bisnis tersendiri sekaligus sebagai penopang dan penggerak sektor-sektor ekonomi lainnya.

4 Stibbe dan Sandbergen (1939), dikutip dalam Working Paper Sajogyo Institute "Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan" (Yanuardy dkk. 2022)



Bagan 2. Liberalisasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebijakan Energi

Keterangan

- Kebijakan ekonomi/energi
- Pertumbuhan ekonomi

Pergeseran Kebijakan Energi Mengikuti Dinamika Industri Global

Meski di masa awal kemerdekaan pemerintah Indonesia berupaya melakukan nasionalisasi pengelolaan sumber-sumber agraria, namun berbagai dinamika ekonomi politik global yang terjadi sepanjang tahun 1960-an hingga 1980-an menggiring dan menjerat Indonesia untuk tergerus kembali dalam liberalisasi ekonomi dan terintegrasi penuh dalam mekanisme pasar global. Tulisan ini tidak akan mengulas dinamika ekonomi politik secara terperinci, namun lebih menekankan pada dinamika ekonomi politik yang melatari pengembangan dan perubahan corak kebijakan dan produksi energi, dari minyak bumi ke batu bara.

Sepanjang akhir 1960-an hingga akhir 1970an, Indonesia menfokuskan pengembangan produksi energi berbahan bakar minyak dan gas karena lebih murah ketimbang batu bara.⁵ Namun demikian, kenaikan harga minyak dan gas (*oil boom*) pada 1973-74 dan 1978-79, yang beriringan dengan “kejujuran produksi”⁶ dan kenaikan upah buruh pada industri-industri baru di Asia (Jepang, Hong Kong, Taiwan, Singapur, dan Korea Selatan), berujung pada krisis ekonomi global pada 1974-75 dan 1980-82. Krisis global ini mendorong industri-industri baru tersebut untuk berupaya menekan biaya produksinya dengan berbagai cara, di antaranya: (1) Merelokasi industri padat karya, misalnya tekstil, elektronik, dan otomotif, ke negara-negara yang biaya produksinya masih rendah, seperti Cina, Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, dan Vietnam;⁷ (2) Beralih menggunakan batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas.⁸

Seiring dengan gejolak ekonomi global tersebut, sejak awal 1980-an, Pemerintah Indonesia mulai aktif mengeluarkan izin-izin konsesi pertambangan batu bara melalui penerbitan Kepres No. 49/1981 terkait Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi I (1981-1990), dan terus ditingkatkan melalui Kontrak Karya batu bara (KKB) Generasi II (1994) dan Generasi III (1997-2000). Bukan kebetulan, pergeseran kebijakan pengembangan energi di Indonesia, dari migas ke batu bara, beririsan atau melayani kepentingan industri-industri global yang berupaya menekan biaya produksinya (lihat Bagan 3).

5 Lucarelli (2010), dikutip dalam Working Paper Sajogyo Institute “Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan” (Yanuardy dkk. 2022)

6 Kejujuran produksi terjadi akibat (1) biaya produksi semakin tinggi dan semakin naiknya upah buruh, sementara (2) komoditas mengalami kelebihan dan tidak dapat terserap pasar, sehingga tidak memungkinkan merealisasikan keuntungan, yang disebut Pratap (2014) sebagai krisis ganda.

7 Sturgeon and Kawakami (2010), dikutip oleh Pratap (2014)

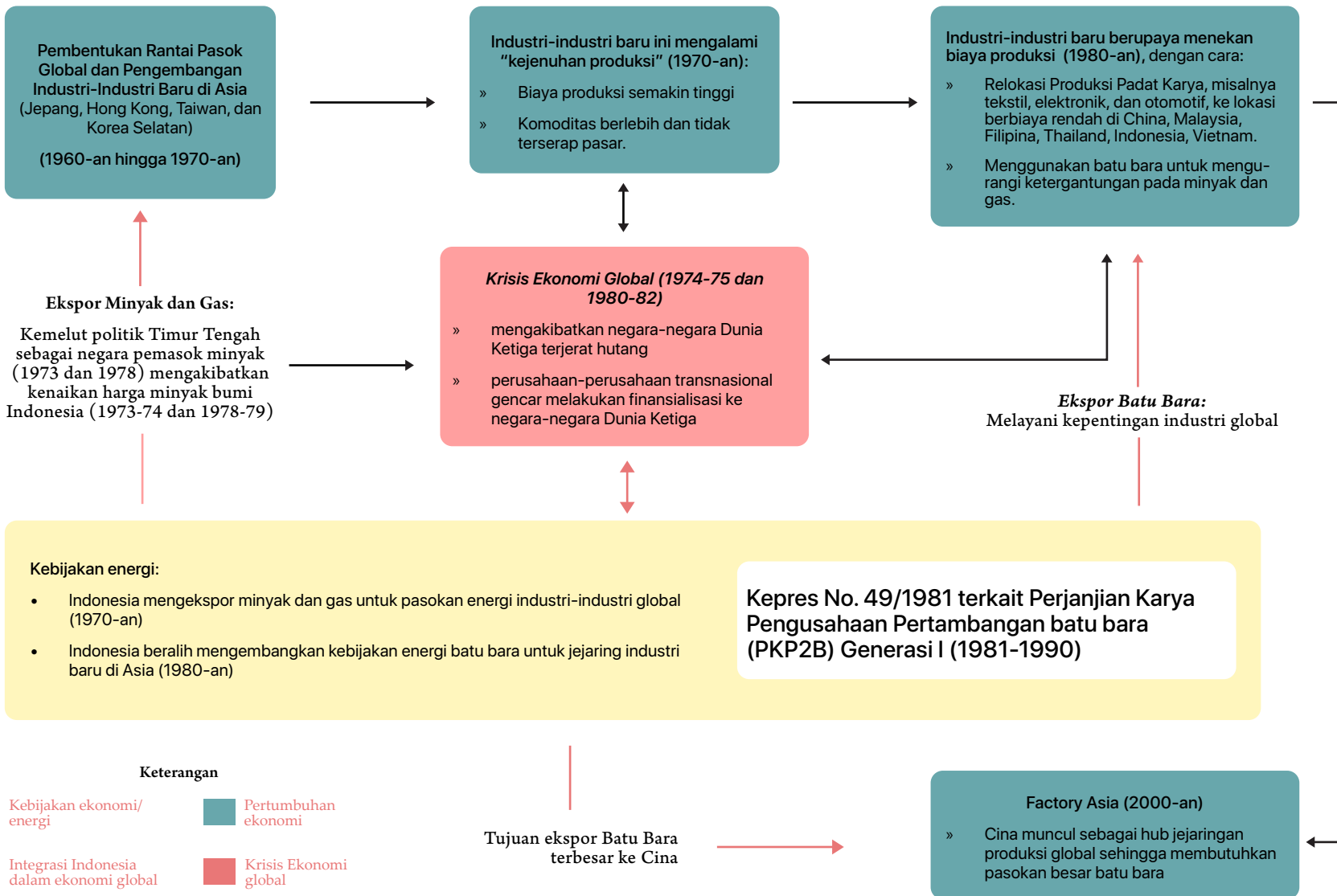
8 Working Paper Sajogyo Institute “Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan” (Yanuardy dkk. 2022)

Setelah krisis ekonomi Asia pada 1997-98, Indonesia yang terjerat hutang melakukan perubahan kebijakan besar-besaran atas desakan IMF-WB, untuk mempertajam “liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi”, salah satunya penerbitan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta.⁹ Penerbitan izin-izin konsesi untuk perusahaan-perusahaan swasta pun semakin gencar dilakukan, termasuk tambang batu bara. Data JATAM menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2001-2010, jumlah Izin Usaha Pertambangan meningkat drastis dari 750 perizinan menjadi 10.000 perizinan, yang 40% dari jumlah tersebut untuk tambang batu bara dengan total area sekitar 16,4 juta hektar. Pada periode ini, tahun 2005, Indonesia tercatat menjadi negara eksportir batu bara terbesar di dunia.¹⁰ Sedangkan tujuan ekspor batu bara terbesar adalah Cina yang sedang berkembang sebagai “Pabrik Asia” (Factory Asia).¹¹ Artinya, perubahan corak kebijakan energi tidak lebih sekedar mengikuti dinamika ekonomi politik global (lihat tabel 1).

9 Yanuardy dkk. (2014); Sangkoyo (2017)

10 Dikutip dalam Working Paper Sajogyo Institute “Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan” (Hamdani dkk. 2022)

11 Factory Asia adalah suatu model yang berisi jaringan-jaringan produksi tingkat regional yang menghubungkan pabrik-pabrik di berbagai wilayah ekonomi Asia yang memproduksi bagian-bagian dan komponen-komponen yang kemudian dirakit, dan produk akhirnya dikirim ke wilayah-wilayah “ekonomi maju”. Jaringan-jaringan tersebut merupakan bagian dari rantai produksi komoditas di tingkat regional dan global (ADB 2013), dikutip oleh Yanuardy dkk. (2014).




Bagan 3. Kejenuhan Produksi, Finansialisasi, dan Kebijakan Energi

Tabel 1. Perkembangan Kebijakan Energi dan Industrialisasi Global

| Perkembangan Industrialisasi Global | 1980-an hingga 1990-an | | | 1997-98 | 2000-an | 2008 | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| | Industri-industri baru di Hong Kong, Taiwan, Singapur, dan Korea Selatan menekan biaya produksi dengan cara: (1) Relokasi Produksi Padat Karya, misalnya tekstil, elektronik, dan otomotif, ke lokasi-lokasi berbiaya rendah di China, Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, Vietnam; (2) Menggunakan batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas yang semakin mahal. | | | | Krisis Ekonomi Asia: Negara-negara Dunia Ketiga terjerat hutang | Factory Asia: Cina muncul sebagai hub jaringan produksi global sehingga membutuhkan pasokan besar batu bara | Krisis Ekonomi Global | | |
| Rezim Ekonomi Global | 1986 | 1994 | 1995 | 1999 | 2005 | 2006 | | | |
| | Putaran perundingan perdagangan multilateral di Uruguay terkait Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) | WB mempromosikan <i>Public-Private Partnership (PPP)</i> | Pembentukan WTO | Pembentukan G-20 | Infrastructure Summit 2005 » menggalang investasi melalui skema kemitraan Pemerintah-Swasta | ADB memberikan pinjaman untuk perumusan kerangka legal-formal dari pelaksanaan KPBU di Indonesia, sebagai bagian dari <i>Infrastructure Reform Sector Development Programme (IRSDP)</i> | | | |
| Kebijakan Ekonomi Indonesia | 1986 | 1987 | 1990 | 1993 | 1995 | 1998 | 2005 | 2006 | 2007 |
| | <i>Liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi</i> | | | | | | | | |
| | Kepres No. No. 31/1986 tentang Pengesahan <i>Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)</i> | UU No. 13/1987 tentang Jalan | PP No. 8/1990 tentang Jalan Tol | Kepres No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan | WB mendanai Proyek Administrasi Pertanahan Indonesia atau Indonesian Land Administration Project (ILAP) | Kepres No. 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta UU No. 10/1998 tentang Perbankan | Perpres No. 42/2005 terkait pembentukan Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) | Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Perpres No. 65/2006 tentang Pengadaan Tanah | UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal |

| Kebijakan Energi Indonesia | 1981-1990 | | | 1994 | | 1997-2000 | 2000-an | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|---|
| | Indonesia ekspor batu bara ke industri-industri baru di negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. | | | | | | Indonesia sebagai negara eksportir batu bara terbesar di dunia, dengan tujuan ekspor terbanyak ke Cina | |
| | Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi I | | | PKP2B Generasi II | | PKP2B Generasi III | | |
| | 1985 | 1989 | 1990 | 1992 | 1994 | 1997 | 2006 | 2007 |
| | UU No. 15/1985 tentang Kelistrikan » membuka peluang swasta untuk membangun Independent Power Producer (IPP) | PP No. 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik | Pembentukan Tim Persiapan Usaha Ketenagalistrikan Swasta (PUKS) | Keppres No. 37/1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta | PP No. 23/1994 » Perubahan PLN dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas » kesepakatan "Power Purchase Agreement" ditandatangani secara resmi antara PLN dan Independent Power Producer (IPP) | Letter of Intent (LoI) antara IMF dan Indonesia » menghapus subsidi dan menaikkan harga listrik | Proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt | Perpres No. 91/2007 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Yang Menggunakan Batu Bara |

Keterangan

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|
|  | Kebijakan ekonomi/energi |  | Pertumbuhan ekonomi |
|  | Krisis Ekonomi global | | |

Kebijakan Energi Memuluskan Perampokan Legal

Kejenuhan produksi yang berujung pada krisis ekonomi Asia pada 1997-98, tidak hanya menjerat negara-negara di Dunia Ketiga dengan hutang luar negeri, tetapi juga menandai semakin gencarnya praktik finansialisasi dan institusionalisasi pasar bebas ke negara-negara di Dunia Ketiga.¹² Dalam periode ini, rezim ekonomi global seperti IMF-WB memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendesak liberalisasi kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk di sektor energi. Bukan kebetulan, kalau sepak terjang rezim ekonomi global ini beririsan dengan tonggak-tonggak perubahan kebijakan energi di Indonesia (lihat tabel 1).

Tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan Hindia Belanda pada akhir abad ke-19, kebijakan-kebijakan energi di penghujung masa Soeharto diterbitkan untuk memuluskan keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta dalam pembangunan PLTU sebagai *Independent Power Producer* (IPP). Pada tahun 1994, Perusahaan-perusahaan swasta ini berhasil membangun kesepakatan dengan pihak PLN terkait *Power Purchase Agreement* dengan skema *take-or-pay*¹³, yang bertepatan di tahun perubahan PLN dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas yang sepenuhnya bersifat bisnis.¹⁴

Tak cukup dengan skema *take-or-pay*, Indonesia yang terjerat hutang akibat krisis ekonomi Asia pada 1997-98 didesak untuk mempertajam privatisasi PLN melalui perumusan undang-undang kelistrikan baru bersama ADB dan World Bank demi menciptakan pasar listrik yang kompetitif, restrukturisasi PLN, meningkatkan proporsi pembangkit swasta, serta menaikkan tarif listrik.¹⁵ Terlebih lagi, atas alasan kegagalan investasi, bisnis energi ini semakin diberi jaminan penuh untuk pasti untung melalui Peraturan Pemerintah No. 91/2007 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Batu Bara. Sementara kerugian besar yang dialami PLN, misalnya kerugian sekitar Rp. 38 triliun pada kuartal pertama 2020, terus dibebankan pada anggaran publik (APBN) atau mendorong tingkat penggunaan dan kenaikan tarif listrik konsumen.¹⁶ Artinya, kebijakan energi memuluskan perampokan secara legal dan berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan bisnis energi.

12 Pratap (2014)

13 Kesepakatan ini berupa keharusan PLN untuk membeli listrik yang diproduksi oleh pembangkit listrik swasta, terlepas digunakan atau tidak (Albab 2020).

14 Sari (2021), dikutip dalam Working Paper Sajogyo Institute "Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan" (Yanuardy dkk. 2022)

15 GOI (1999); GOI (1997), dan GOI (1998), dikutip dalam Working Paper Sajogyo Institute "Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan" (Yanuardy dkk. 2022).

16 Working Paper Sajogyo Institute "Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan" (Yanuardy dkk. 2022).



Pembiakan Pembangkit Listrik Swasta dan Jejaring Kawasan Industri

Penajaman liberalisasi kebijakan energi sejak krisis ekonomi Asia pada 1997-98, tidak hanya memicu pengembangan bisnis energi, tetapi juga memacu pembesaran dan perluasan industri di berbagai sektor. Seolah kebijakan energi saling bersambut dengan kebijakan ekonomi. Pada tahun 2006, proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt (Perpres No. 71/2006) beririsan dengan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi (Inpres No. 3/2006) dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 65/2006). Bahkan, dalam rentang 2006-2010, Bank Pembangunan Asia memberikan pinjaman sekitar US\$880 juta untuk mempersiapkan skema kemitraan pemerintah-swasta sebagai bagian dari Program Pembangunan Sektor Reformasi Infrastruktur (*Infrastructure Reform Sector Development Programme* atau IRSDP).¹⁷

Gambar 1: Switchyard Cikarang Listrindo di MM2100

17 Sangkoyo (2017)

Pasca krisis ekonomi global 2008, beragam kebijakan hilirisasi industri pun digemborkan dan digenjut, seperti Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (2011), proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (2015),¹⁸ dan pengalihkan produksi batu bara untuk kepentingan pasar domestik atas desakan internasional melalui Paris Agreement.¹⁹ Dalam periode ini, pembangunan pembangkit dan jejaring listrik swasta tidak hanya membiak dan menjamur, tetapi juga memacu perluasan dan pembesaran kawasan industri.

18 <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/peluncuran-program-pembangunan-pembangkit-35000-mw>

Salah satu contoh pembiakan pembangkit listrik adalah bisnis energi yang dikembangkan oleh PT Cikarang Listrindo Tbk, sebuah perusahaan listrik yang didirikan pada 28 Juli 1990 sebagai *Independent Power Producer* (IPP) generasi pertama, yang awalnya bergerak dalam bisnis energi berbahan gas lalu membiakkannya pada bisnis energi berbahan batu bara. Pada tahun 1991, Cikarang Listrindo memulai kegiatan pembangunan switchyard 150 kV yang tersambung dengan jaringan transmisi listrik milik PLN, sistem Jawa-Bali. Pada tahun 1992, Cikarang Listrindo mendapat izin dari Menteri Muda Perindustrian untuk memasok listrik ke lima kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Kemudian pada tahun 1993, sebuah pembangkit listrik berbahan gas yang berlokasi di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, dengan kapasitas 60MW mulai beroperasi. Di akhir 1998, Cikarang Listrindo meningkatkan kapasitas pembangkit menjadi 300 MW. Selanjutnya, pada tahun 2005, perusahaan ini membuat rencana pembesaran kapasitas dengan menambah pembangkit terpasang menjadi 646 MW.

19 RPJMN 2015-2019, dikutip dalam Working Paper Sajogyo Institute "Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan" (Yanuardy dkk. 2022).

44

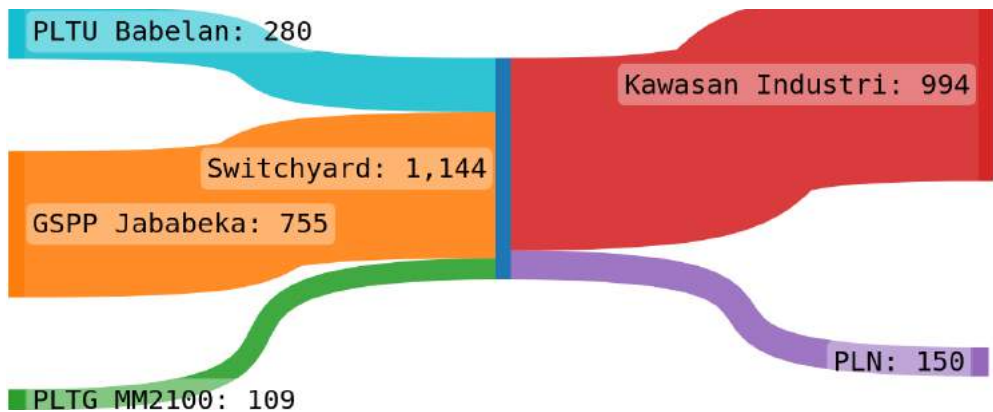
Pada tahun 2006, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat keputusan No. 2045-12/43/600.3/2006 memberikan Cikarang Listrindo "Izin Usaha Listrik untuk Memasok Listrik bagi Publik", untuk memasok listrik ke lima kawasan industri selama 30 tahun. Pada tahun 2015, Cikarang Listrindo menyelesaikan pembangunan pembangkit berbahan bakar gas dengan kapasitas 109 MW di Kawasan Industri MM2100. Kemudian pada tahun 2017, perusahaan listrik ini mulai mengoperasikan sebuah PLTU di Babelan dengan kapasitas 2x140 MW. Dengan demikian pada akhir 2021, Cikarang Listrindo memiliki total kapasitas pembangkit sebesar 1,144 MW.

Kapasitas pembangkit sebesar ini disalurkan ke *switchyard* yang berada di MM2100 dan kemudian didistribusikan ke PLN sebesar 150 MW dalam sebuah kesepakatan Power Purchase Agreement (PPA) untuk dijual ke masyarakat. Sedangkan sisanya, sebesar 994 MW dijual ke lima kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi: EJIP (berdiri tahun 1990), MM2100 (berdiri pada 1990), Lippo Cikarang (berdiri pada 1987), Hyundai (berdiri pada 1991), dan Jababeka (berdiri tahun 1989). Pada tahun 2021 lima kawasan ini mengkonsumsi 3.191 GWh energi listrik yang diproduksi oleh Cikarang Listrindo, setara dengan 122.835,0326 tons batu bara.²⁰

EJIP, singkatan dari East Jakarta Industrial Park, adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Sumitomo Corporation dengan kepemilikan saham sebesar 49%, PT. Spinindo Mitradaya dengan kepemilikan saham sebesar 46%, dan PT. Lippo Cikarang dengan kepemilikan saham sebesar 5%. Kawasan yang menempati lahan seluar 320 ha ini sekarang dihuni oleh 89 perusahaan penyewa dengan rincian: 76 manufaktur, dan 13 perusahaan jasa.²¹

20 'Gigawatt Hours to Tons Of Coal Equivalent | Kyle's Converter'

21 'PT. EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK' <<https://ejip.co.id/en/tenant>> [accessed 12 December 2022].



Gambar 2: Aliran produksi dan konsumsi energi lima kawasan industri di Kabupaten Bekasi

MM2100 adalah sebuah kawasan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh PT. Megalopolis Industrial Development (MMID). Perusahaan ini didirikan oleh Marubeni Corporation (Jepang) dan Mangunggal Group (Indonesia). Saat ini, kawasan yang menempati lahan seluas 805 hektar ini, dihuni oleh 190 perusahaan.²²

22 'Tenant | MM2100 Industrial Town' <<https://mm2100.co.id/tenant/>> [accessed 12 December 2022].



Hyundai adalah nama lain dari Bekasi International Industrial Estate (BIIE). Kawasan ini disebut begitu saja oleh masyarakat dengan Hyundai karena pemilik kawasan ini adalah PT. Hyundai Inti Development, perusahaan patungan antara Hyundai Corporation (Korsel) dengan PT. Lippo Cikarang Tbk. Kawasan yang menempati lahan seluar 200 hektar ini dihuni oleh 104 pabrik, 26 di antaranya adalah perusahaan asal Korea Selatan.²³

Jababeka yang menempati lebih dari 2000 hektar luas lahan dan dihuni oleh lebih dari 2000 perusahaan lokal dan asing dari Amerika, Jepang, Perancis, Inggris, Belanda, Australia, Korea, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan sebagainya. Kawasan ini dikembangkan oleh ProLH GTZ²⁴ di bawah program kerjasama teknis antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Republik Jerman. Kawasan industri ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah kawasan yang disebut dengan Kota Jababeka yang menguasai lahan seluas 5.600 hektar.²⁵Perusahaan swasta yang mengembangkan bisnis energi di Indonesia mampu membiakkan bisnisnya, tak hanya pengembangan dari pembangkit energi berbahan gas ke pembangkit energi berbahan batu bara, tetapi juga pembesaran dan perluasan saluran listriknya ke kawasan Industri. Pengembangan bisnis energi dan perluasan kawasan industri yang saling menyambut dan bersinergi ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan nasional yang mengalami “liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi” yang terus digenjut dan dipertajam pasca krisis ekonomi global 1980-82 (lihat Tabel 1). Penajaman liberalisasi kebijakan ekonomi dan energi ini juga berkelindan erat dengan dinamika ekonomi global, seperti pembentukan jejaring produksi, skema finansialisasi dan relokasi produksi ke wilayah-wilayah dengan biaya produksi murah dan upah buruh rendah, yang bahkan dijamin untung oleh pemerintah Indonesia. Namun demikian, ekspansi bisnis ini beririsan juga dengan semakin membesar dan meluasnya dampak-dampak atau krisis sosial-ekologis, yang belum ada skema penghadangan ekspansi bisnis dan pemulihan krisis sosial-ekologis secara menyeluruh. Lalu, bagaimana kita menyikapinya?.

23 'Bekasi International Industrial Estate', Indoplaces.Com <http://www.indoplaces.com/mod.php?mod=indonesia&op=view_region®id=3002> [accessed 12 December 2022].

24 Program Lingkungan Hidup Indonesia Jerman

25 'Industri', Jababeka <<https://www.jababeka.com/id/pembangunan-lahan/industri/>> [accessed 12 December 2022].

Daftar Bacaan

- Albab, Ulul. 2010. *Analisis Ekonomi Politik Korupsi di Perusahaan Listrik Negara (Sebuah Tinjauan dari Perspektif Teori Kleptokratik terhadap Kasus Listrik Swasta PLTU Paiton 1)*. Jurnal Aplikasi Manajemen (Vol. 8, No. 1, Februari 2010). Diakses pada 19 Desember 2022, dari tautan berikut: <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/download/993/858>
- Pratap, Surendra. 2014. *Emerging Trends in Factory Asia: International Capital Mobility, Global Value Chains, and the Labour Movement*. Kowloon Hong Kong: Asia Monitor Resource Centre..
- Sangkoyo, Mitrardi. 2017. *Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Bidang Infrastruktur di Indonesia Pada periode 2005–2016: Liberalisasi Sektor Infrastruktur*. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Yanuardy, Dian, Noer Fauzi Rachman, Swanvri, Muntaza, Didi Novrian, Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir, Syarif Arifin, Kartika Manurung, Hotler P. Sitorus, Saurlin Siagian, Dwitcho Frasetiandy, Fahrudin Maloko, Andika, Torry Kuswardono. 2014. *MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia Studi Kritis Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. Bogor: Sajogyo Institute. Diakses pada 19 Desember 2022, dari situs Sajogyo Institute berikut: <https://sajogyo-institute.org/mp3ei-master-plan-percepatan-dan-perluasan-krisis-sosial-ekologis-indonesia/>
- Yanuardy, Dian, Sheila Herlita, Neni Nurrahmawati, Siti Latifah, Fikrian Firdaus, Muklis, Izzudin Prawiranegara, Fathurrahman, Novi Kurniati, Fandi Ramadhan, dan Ahmad Hamdani. 2022. “*Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan: Studi Kasus PLTU Cilacap dan Cirebon*”. Working Paper Sajogyo Institute (Vol. 2, No. 4, November 2022). Bogor: Sajogyo Institute. Diakses pada 19 Desember 2022, dari situs Sajogyo Institute berikut: <https://sajogyo-institute.org/ekonomi-politik-energi-dan-industri-kelistrikan/>





1.3 PENDIDIKAN KRITIS: METODE BAGI PENGORGANISIRAN RAKYAT

Habiburrachman

Pendahuluan

Modul Pendidikan Kampung yang Anda pegang ini merupakan usaha kami menyediakan metode pengorganisasian rakyat. Suatu pengorganisasian dengan menciptakan ruang belajar dalam rangka menumbuhkan kesadaran kritis. Di tengah pembebasan krisis sosial ekologis,¹ dan di tengah konsolidasi kekuasaan negara dan kapital untuk merampok alam demi mengamankan rantai energi bagi akumulasi surplus nilai-lebih,² kehadiran ruang belajar kritis teramat dibutuhkan. Ruang belajar sebagai gerakan sosial, sebagai platform untuk membangun perlawanan menentang ‘kerangka dunia’ yang dipaksakan logika kapital kepada rakyat.

Dengan tujuan menjadikannya untuk pengorganisasian, Modul Pendidikan Kampung ini menggunakan metode dan prinsip pendidikan kritis Paulo Freire dan Kaji Tindak Partisipatif Prof. Sajogyo. Prinsip pokok pendidikan kritis sebagai metode pengorganisasian rakyat adalah pendidikan sebagai proses penyadaran atau *konsientisasi*. Sebagaimana kami yaikini, dan sebagaimana Freire katakan, salah satu faktor untuk membangun gerakan perlawanan ialah perkembangan kesadaran kritis. Kesadaran kritis adalah kemampuan mengenali bagaimana sistem dan struktur yang ada bekerja dan bagaimana ia mengondisikan realitas sosial, serta ia adalah suatu kemampuan untuk terlibat dalam dan mengubah realitas melalui hubungan dialektik antara aksi dan refleksi. Sebab itu, kami meletakkan pendidikan kritis,

1 Lihat, Abdullah El-Hawie, “Kapitalisme dan Krisis Sosial-Ekologi”.

2 Lihat, Syiqqil Arofah, “Ekonomi Politik Kebijakan Energi”.

yang bersamanya mensyaratkan konsientisasi, untuk membangun gerakan sosial. Gerakan sosial untuk pembebasan, bagaimana pun, memerlukan proses yang membebaskan dalam membangunnya. Itulah sebabnya metode pendidikan kritis penting bagi rancang-bangun gerakan. Ia mengedepankan prinsip dialog, demokratisasi dan kesetaraan dalam proses belajar, serta postulat bahwa semua orang setara secara intelektual dan memiliki hak yang sama untuk menciptakan dunia dengan pengetahuannya sendiri.

Senada dengan prinsip pendidikan kritis Paulo Freire, prinsip Kaji-Tindak Partisipatif Prof. Sajogyo mengedepankan prinsip “Belajar Bersama Bertindak Setara melalui proses aksi-refleksi terus menerus bersama rakyat; produksi pengetahuan melalui riset merupakan suatu aksi transformasi sosial, juga suatu pembebasan kesadaran untuk memungkinkan rakyat secara kritis menafsirkan realitas tempat mereka hidup sambil memperluas pembacaan mereka atas dunia. Sajogyo menekankan bahwa Kaji-Tindak menjadi partisipatif ketika di dalamnya berlangsung proses pendidikan kritis melalui pengorganisasian rakyat. Dalam hal ini, ia menitikberatkan subjek dalam proses kerja partisipasi adalah golongan terlemah lapis bawah di pedesaan. Mereka merupakan mitra setara dalam proses produksi pengetahuan dalam Kaji-Tindak Partisipatif, sekaligus subjek utama dalam merancang dan melaksanakan agenda gerakan sosial untuk perubahan.

52

Untuk memperpanjang paparan di atas, dan untuk mengkerangkai prinsip dan metode Modul Pendidikan Kampung, tulisan ini hadir kepada sidang pembaca yang berkepentingan untuk menerapkan modul. Setidaknya tulisan ini akan menyajikan tiga pembahasan. Pertama, tulisan ini akan memaparkan posisi Modul Pendidikan Kampung sebagai metode pengorganisasian. Kedua, tulisan ini akan memberi gambaran umum tentang prinsip dan metode pendidikan kritis dari Paulo Freire dan Prof. Sajogyo. Ketiga, tulisan ini akan menghadirkan latar kenapa kami bertumpu pada pendidikan kritis. Menimbang signifikansi pendidikan kritis, tulisan ini bermula dengan urutan terbalik.

Prakondisi Bagi Signifikansi Pendidikan Kritis

Objek di hadapan kita, titik mula bagi pengorganisasian gerakan sosial, gerakan melawan penindasan dan ketidakadilan, adalah pendidikan kritis. Titik mula pendidikan kritis adalah kemerdekaan manusia. Masalah mendasar bagi kemerdekaan manusia, seperti terjadi berulang sepanjang sejarah, adalah dehumanisasi. Dehumanisasi paling laten merayap dalam keseharian. Masalahnya ialah kenyataan harian tampak berjalan apa adanya sebagai peristiwa alamiah. Pada keadaan normal akan tampil gambar-gambar macam berikut: Petani berangkat ke sawah di pagi buta, buruh berangkat ke pabrik dengan tergesa, anak-anak berangkat ke sekolah mengikuti jadwal, dan di rumah para istri atau ibu mengurus kebersihan dan menyiapkan makanan, dan kemudian esok gambar-gambar itu kembali berulang. Dari perulangan ini muncul kata “biasanya” atau “seperti biasanya”. “Biasanya saya masak sarapan untuk suami sejak waktu Subuh” atau “Biasanya saya di rumah sehabis magrib setelah pulang dari ladang,” atau “Seperti biasanya, akhir bulan kami ngutang buat beli beras dengan nyicil dengan gaji bulan berikutnya” dan seterusnya.

Namun, pada frasa “biasanya” atau “seperti biasanya” sebetulnya ketidakadilan terjadi; kekuasaan yang menindas manusia dan menghancurkan alam terus mereproduksi diri, beroperasi secara halus dan melucuti kesadaran kritis. Kesadaran kritis, tulis Mansour Faqih, adalah kemampuan menalar yang “lebih melihat aspek sistem dan struktur sosial, politik dan budaya sebagai sumber masalah” ketidakadilan. Ia kemampuan mengenali bagaimana sistem dan struktur yang ada bekerja dan bagaimana ia mengondisikan keadaan masyarakat.³ Bila tanpa kesadaran kritis, seseorang tidak akan melihat keterkaitan antara ketidakadilan dengan sistem dan struktur di luar individu dan menganggapnya lebih merupakan takdir tak terelakkan karena sudah digoreskan sebagai suratan nasib, atau seseorang malah jatuh ke dalam pandangan bahwa kesulitan hidup tak lebih dari akibat-akibat dari perbuatannya semata. Dengan melucuti kesadaran kritis, kekuasaan yang menindas membikin masyarakat pasrah pada nasib atau menyalahkan diri mereka sendiri. Tidak ada lagi celah kecil untuk mengubahnya, bahkan, untuk sedikit lebih baik.

Sialnya, pelucutan kesadaran kritis ini berlangsung secara harian

3 Mansour Fakih, “Paradigma Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Metode dan Praktek Pendidikan” dalam Rahardjo, Toto, et, al., (eds), *Pendidikan Popular*, (Yogyakarta: ReaD Books, hasil kerjasama INSIST dan PACT Indonesia, 2000).

dalam waktu panjang bahkan seumur hidup. Realitas ketertindasan dan ketidakadilan pun tak ubahnya peristiwa lumrah dan tidak perlu dipertanyakan. Pada momen paling putus asa, pada momen di mana tidak ada harapan sama sekali, jadilah hari ini tampak tidak berbeda secara hakiki dari hari kemarin. Begitupun hari esoknya: masih hari *seperti biasanya*. Di sana, tepat dalam hari *seperti biasanya* kekuasaan menjadi tidak terlihat dan tepat ketika tidak terlihat ia mencengkeram dengan lebih kuat. Sebab itu—sekadar menyebut beberapa contoh, dan daftarnya Anda bisa perbanyak, penurunan harga hasil tani, pemanjangan jam kerja di pabrik, dan kenaikan harga bahan pokok diterima dengan wajar. Termasuk proyek pembangunan juga disambut layaknya hasil kesimpulan logis dari penalaran tak bercela. Tak peduli apakah pembangunan merusak syarat keselamatan hidup, di bawah tekanan kebutuhan ekonomi ia diamini sebagai niat baik untuk meningkatkan taraf penghidupan. Apakah menyusutkan kesehatan dan merampas waktu untuk pemulihan tenaga diri, bekerja di bawah hubungan eksploitatif pun tetap dijalani. Bahkan tidaklah mustahil menerbitkan pertanyaan “apa yang salah dengan pembangunan, sistem ekonomi kapitalisme, relasi patriarkal, dan lain-lain itu?”

Pelucutan kesadaran kritis bagian dari penyederhanaan diri manusia menjadi satu dimensi. Marx mengatakan bahwa menjadikan manusia satu dimensi adalah abstraksi atas kualitas manusia. Keberagaman individualitas dicerabut, kemudian diringkus menjadi sekadar ‘tenaga’ yang hanya bisa dipergunakan untuk bekerja di bawah sang penindas: untuk menghamba di bawah relasi sosial, ekonomi dan politik eksploitatif. Di satu sisi, manusia dikotak-kotakkan ke dalam spesialisasi kerja, dan dicacah ke dalam individualisme layaknya atom yang saling independen. Di mana kemampuan dan keterampilan manusia dikembang-biakkan berdasarkan pembagian kerja yang telah terkotak dan terspesialisasi. Di lain sisi, pada saat bersamaan hubungan sosial antar sesama justru dibatasi semata ke dalam hubungan kerja, bukan hubungan sosial yang lebih luas. Padahal secara faali, manusia memiliki beragam motivasi dalam menjalin hubungan sosial, tapi justru dipaksa berhubungan karena kepentingan

kerja, karena pengejaran atas kepentingan diri (*self-interest*).

Dalam penyederhanaan ini kualitas kemanusiaan dikesalkan—kalau bukan malah dinihilkan sama sekali—menjadi hanya “perkakas” dan “tenaga” di mana kerusakan tubuh dan pikiran tak terpisahkan dari proses ini. Dalam *Capital*, Marx menulis bahwa penyederhanaan menjadi manusia satu dimensi ini merusak (1) kapasitas intelektual dan keberanian berpikir, (2) kepekaan sosial, (3) ketangkasan tubuh, dan (4) membuat manusia tidak bisa mengembangkan tenaga, pikiran dan ketekunan untuk mengerjakan hal lain di luar yang telah ditanamkan kepadanya. Seorang buruh di perakitan motor begitu dipecah, dia tidak lantas bisa memproduksi motor. Justru boleh jadi dia kebingungan, tidak tahu apa mesti dia kerjakan. Petani di pedesaan begitu dirampas dari tanahnya tidak lantas bisa bekerja di sektor industri atau membuka usaha lain. Boleh jadi dia terkatung-katung di kampung atau di kantong pemukiman kumuh urban. Bergumul dalam pekerjaan dan rutinitas yang sama dalam seluruh hidupnya, tidak memiliki kesempatan untuk mengerahkan pemahamannya. Dia menjadi bodoh dan ignorant.

55

Sudah diringkas menjadi “perkakas” dan “mesin”, manusia juga dibenamkan, menukil bahasa Paulo Freire, ke dalam budaya bungkam (*submerged in cultural silence*) sehingga manusia kehilangan bahasa. Kehilangan bahasa sekaligus berarti lenyapnya kemampuan berpikir, karena kegiatan berpikir hanya melalui bahasa. Dalam hal ini kemudian relasi penindasan menggantinya dengan bahasa telah diatur sedemikian rupa. Manusia diberi nama “tenaga kerja produktif”, “masyarakat tertinggal”, “ibu rumah tangga”, dan sebagainya. Ketika berpikir dengan bahasa tersebut, manusia berpikir dengan bahasa penguasa, dan itu berarti berpikir dengan bahasa yang justru kian menancapkan realitas penindasan.

Panggilan Ontologis Manusia: Membebaskan Diri dari Penindasan

Realitas penindasan yang segera bersamanya terjadi proses penyederhanaan manusia jadi satu dimensi bertentangan dengan panggilan ontologis manusia menurut Paulo Freire. Panggilan

fitrah bagi manusia adalah menjadi ‘manusia sejati’ atau *insan kamil*. Manusia sejati adalah pelaku (subjek) bukan penderita (objek) di dalam sejarah. Ia penguasa bagi dirinya, pemilik kuasa penuh untuk menciptakan sejarahnya dalam kaitan dengan dunia ruang ia hidup. Fitrah manusia adalah menjadi manusia merdeka. Dengan bahasa dan pengetahuannya manusia bisa mewujudkan panggilan untuk menjadi manusia sejati, mengatasi kekangan dan halangan yang membatasinya meraih kemerdekaan hakiki.

Untuk menjadi manusia sejati, kata Freire dalam *Pendidikan yang Membebaskan* (2001), manusia harus menjalin hubungan dengan sesama dan dengan dunia. Dalam berhubungan dengan dunia yang ia hidupi itu, manusia harus mengatur diri, memilih tanggapan terbaik, mengujinya lagi, bertindak, berefleksi dan mengubah tindakan-tindakannya. Dengan kesadaran penuh dan berhubungan secara kritis, secara timbal balik memadukan *aksi-refleksi* tanpa henti, manusia mengalami dunianya.

56

Bersamaan dengan itu, manusia harus menyadari kemewaktuan dari keberadaannya di dunia. Dengan menyadari bahwa manusia ada di dalam waktu, ia mampu menjangkau hari kemarin, mengenai hari ini dan menemukan hari esok. Bukan terkurung tanpa kesadaran kritis di dalam dimensi tunggal hari-hari *seperti biasanya*, suatu dimensi waktu di mana kuasa opresi yang membentuk dan mencipta. Terbenam dalam perulangan hari-hari *seperti biasanya* merupakan *ketidakmampuan untuk muncul dari waktu yang menenggelamkannya di dalam dimensi tunggal* “hari ini” *tanpa kesadaran*. Padahal, Freire berkata, “Manusia berada di dalam waktu. [...] Manusia memasuki realitas dan mengubahnya.”⁴

Memasuki realitas dan mengubahnya inilah yang disebut kemampuan *integrasi*. *Integrasi* kemampuan khas milik manusia. *Integrasi* adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri ditambah kemampuan untuk kritis dalam membuat pilihan dan mengubah realitas. Memiliki kemampuan integrasi membedakan manusia dari binatang yang hanya mempunyai kemampuan adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan kemampuan integrasi tersebut manusia menjadi pelaku (*subjek*) di dalam sejarah. Jika hanya berada

4 Paulo Freire, *Pendidikan yang Membebaskan*, terj. Martin Eran, (Jakarta: Melibas, 2001), hlm. 1-2.

di dalam dunia dengan kemampuan adaptasi maka manusia tak lain adalah penderita (*objek*) di dalam sejarah, sekadar menerima dengan pasif atas segenap perubahan yang terjadi di luar keterlebitannya. Kualitasnya tidak berbeda dengan binatang, dan artinya manusia mengalami dehumanisasi. Ketika masyarakat cuma diajak untuk adaptasi, masyarakat sebenarnya tidak diajak untuk mengubah kenyataan penindasan yang menghancurkan lingkungannya, yang juga merusak kemanusiannya. Dengan kata lain masyarakat sebetulnya diajak melanggengkan dehumanisasi atas diri mereka sendiri.

Pendidikan Kritis

Mengembalikan Fitrah Manusia

Mengingat dehumanisasi sudah begitu laten dalam sejarah dan dinormalkan, Paulo Freire merintis metode pendidikan kritis. Pendidikan kaum tertindas, pendidikan dengan visi merebut kembali kemanusiaan dalam rangka melawan ketidakadilan yang dialami kaum tertindas. Pendidikan kritis ini bertolak dari pandangan bahwa dunia bumi manusia bukanlah tatanan yang statis dan tertutup, dan realitas ketertindasan “bukanlah takdir yang terberi” dan bukan tanpa pintu keluar. Betapa pun tatanan yang dibentuk oleh ketidakadilan, eksploitasi dan kekerasan dipertahankan tetap abadi dan tak goyah, bukan tidak berarti tanpa celah untuk ditentang. Betapa pun realitas penindasan diwajibkan sebagai kenyataan *apa adanya*, ia bukanlah fitrah, bukan kenyataan *yang seharusnya ada*. Artinya, realitas tersebut senantiasa tidak kedap perubahan.

Pendidikan kritis diperlukan untuk mengubah realitas tersebut. Dan tepat dalam jantung dehumanisasi, pendidikan kritis mendesak dibutuhkan. Sebab, bagaimanapun, dehumanisasi adalah syarat bagi berlangsungnya sistem dan struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang menindas dan tak adil. Pendidikan kritis bertujuan mengembalikan kemanusiaan manusia. Mengembalikan kemanusiaan manusia, dengan demikian, adalah pembalikan atas dehumanisasi, dan segera bersamanya ia juga adalah perlawanan atas penindasan dan ketidakadilan.

Apa yang sangat pokok dari pendidikan kritis, sebagaimana Freire

suratkan, adalah proses penyadaran atau *konsientisasi*. Ini berarti bahwa, sebagaimana juga Mansour Fakhri tulis, pendidikan kritis “merupakan suatu sarana ‘memproduksi’ kesadaran untuk mengembalikan kemanusiaan manusia, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasyarat upaya untuk pembebasan.” Penyadaran atau *konsientisasi* mengarah untuk memampukan kaum tertindas membongkar kenyataan yang mereka hadapi dengan kritis, dengan melihat kaitannya atas kerja sistem dan struktur. Bahwa realitas ketertindasan dan tak adil ini suatu gejala yang lebih sistemik. Di sini, pendidikan kritis bertumpu pada pemikiran dan paradigma kritik ideologi, analisis kelas, dan analisis wacana kritis terhadap sistem dan struktur sosial, ekonomi dan politik yang tidak adil.

Secara simultan di sisi lainnya, pendidikan kritis juga merupakan “media untuk resistensi dan aksi sosial yang tidak dapat dipisahkan, bagian dari proses transformasi sosial.”⁵ Dalam hal ini pendidikan kritis bertumpu pada praksis. Praksis adalah satu kesatuan antara aksi dan refleksi. Subjek secara kritis merefleksikan realitas mereka, dan mengambil aksi transformatif untuk mengubah realitas. Subjek memperdalam kesadaran mereka melalui refleksi atas kenyataan dan segera bersama refleksi ini, mengubah kenyataan tersebut menjadi lebih baik. Atau dari sisi sebaliknya, bertindak untuk “mengubah kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas tersebut.”⁶

Jadi, pendidikan kritis tak lain merupakan gerakan pembebasan itu sendiri. Pendidikan adalah masalah politik. Suatu proyek perjuangan politik.⁷ Sebagai proyek politik, kemudian muncul pertanyaan: proyek politik apa yang dihadirkan oleh pendidikan kritis kepada kita? Pendidikan kritis pada mulanya rintisan untuk menandingi apa yang disebut “*banking school*”. Banking School adalah sistem pendidikan arus utama yang meletakkan relasi guru-murid sebagai relasi subjek-objek. Murid berposisi sebagai pendengar penjelasan guru, di mana guru menjadi satu-satunya subjek yang memiliki otoritas untuk menjelaskan pelajaran. Pemusatan otoritas untuk menjelaskan kepada guru berangkat dari dan mengafirmasi asumsi

5 Mansour Fakhri, “Paradigma Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Metode dan Praktek Pendidikan” dalam Rahardjo, Toto, et, al., (eds), *Pendidikan Popular*, (Yogyakarta: ReaD Books, hasil kerjasama INSIST dan PACT Indonesia, 2000).

6 Roem Topatimasang, “Memahami Filsafat Pendidikan Freire”, dalam Rahardjo, Toto, et, al., (eds), *Pendidikan Popular*, (Yogyakarta: ReaD Books, hasil kerjasama INSIST dan PACT Indonesia, 2000).

7 Sajogyo, “Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pemberdayaan” dalam *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi*, (Yogyakarta: Cenderas Pustaka Rakyat Cerdas, 2006), hlm. 123.

bahwa murid tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami. Guru kemudian datang mencekokinya pengetahuan. Ini membangun hierarki guru-murid, bahwa terdapat hierarki intelektual di mana yang pertama menjadi hakim tunggal atas pengetahuan mana paling benar, sementara yang kedua hanya bisa memahami sejauh mendapat pencerahan dari yang pertama. Kemudian, tidak saja menegakkan hierarki intelektual, pendidikan model ini mengarah pada proses pembodohan, melucuti kesadaran kritis, dan pada akhirnya, melanggengkan proses dehumanisasi.

Freire menyatakan bahwa sistem *banking school* tak lain pula bagian dari kerja mempertahankan sistem dan struktur sosial yang dominan. Ilustrasi dari pernyataan Freire ini menampak dalam kenyataan pendidikan di bawah kapitalisme, di mana pendidikan dihambakan pada hukum pasar sehingga tak ubahnya mesin produksi ekonomi. Desain pendidikan menyesuaikan kebutuhan kapitalisme untuk bertumbuh, yang salah satunya untuk mencetak tenaga kerja baru. Dalam rangka mencapai tujuan ini sistem pendidikan menanamkan budaya bungkam (*cultural silence*) untuk menyetel pola pikir patuh, dan dalam jangka panjang, untuk menghalangi adanya pembayangan akan perubahan. Sistem *banking school* ini juga memproduksi pengetahuan yang terpisah dari realitas atas nama pengetahuan objektif atau netral. Seolah pengetahuan dan realitas dua dunia terpisah dan berbeda. Alih-alih pengetahuan membantu untuk memahami dunia secara kritis dan lebih dekat, ia justru menjauhkan. Bahkan jatuh sekadar pengetahuan hafalan.

Proyek politik pertama pendidikan kritis ini, karenanya, adalah transformasi pengetahuan. Pendidikan kritis menekankan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Bahwa pengetahuan berhubungan secara intrinsik dengan kekuasaan, dan tidak ada pengetahuan objektif atau netral. Pendidikan kritis dengan tajam memeriksa hubungan pengetahuan dan kekuasaan tersebut. Dari proses ini, proyek politik pendidikan kritis bertujuan untuk membangun bentuk-bentuk pengetahuan alternatif, suatu kontra-hegemoni atas kekuasaan dominan. Produksi pengetahuannya selalu beralas pada fakta tak terbantahkan bahwa pengetahuan dan realitas bukan dua dunia terpisah, tapi dalam satu hubungan dialektik. Pengetahuan berasal dari realitas dan

kembali padanya dalam bentuk aksi untuk mengubahnya menjadi tempat terbaik bagi kemanusiaan. Pengetahuan pun bukan lagi hafalan, namun berasal langsung dari hasil “refleksi kritis” yang berwujud bahasa miliknya sendiri. Bukan hasil cekokan yang diinternalisasi secara mekanis.

Pada saat bersamaan pula, proyek politik pendidikan kritis adalah demokratisasi, suatu penciptaan kultur emansipatoris di dalam ruang belajar. Terhadap hubungan hierarkis dalam proses belajar, pendidikan kritis memiliki agenda untuk mengorganisasi proses belajar yang lebih demokratis. Tujuannya adalah untuk mengubah hubungan hierarkis menjadi hubungan setara sebagai subjek. Mengganti relasi guru-murid dengan relasi semua adalah guru dan semua adalah murid, atau dengan kata lain, menggantikannya menjadi relasi subjek-subjek. Tidak ada lagi hierarki intelektual. Secara radikal, pendidikan kritis mengambil postulat bahwa semua orang setara secara intelektual. Baik guru-murid, keduanya memiliki kapasitas untuk mencerap realitas secara kritis, untuk lantas secara bersama-sama keduanya merefleksikan dalam kaitan dengan struktur lebih sistemik.

60

Demokratisasi dalam agenda politik pendidikan kritis pada dasarnya juga suatu tantangan atas pendangkalan praktik demokrasi. Di era demokrasi neoliberal, praktik demokrasi hanya menghitung partisipasi aktif warga dalam pemilihan umum dan pada saat bersamaan tidak menyediakan “kesempatan memilih” untuk perkara sangat mendasar seperti, katakanlah, pembangunan, model ekonomi, dan seterusnya. Demokrasi tidak substansial, semata ajang pengumpulan suara rakyat untuk konsolidasi kekuasaan di tangan para elit. Sebaliknya, pendidikan kritis mendorong demokratisasi—dimulai dari bagaimana ruang dan proses belajar diorganisasi, ke tahap radikal. Demokrasi di dalam pendidikan kritis mengakomodasi hak setara untuk menciptakan dunia terbaik untuk dihidupi. Misalnya, dengan “*problem posing education*” atau pendidikan “hadap masalah”, pendidikan kritis mengurai masalah dalam kenyataan yang mereka alami. Di mana dalam proses belajar, guru-murid atau fasilitator-peserta belajar, secara bersama-sama, mempelajari kenyataan tersebut, membongkar ketidakadilan di dalamnya, dan lantas merancang rencana aksi (*action plan*) untuk mengubahnya. Melalui metode pendidikan

“hadap masalah” ini pendidikan kritis merupakan praktik mengalami dan memahami kebebasan, sebuah praktik demokrasi itu sendiri.

Produksi Pengetahuan Pendidikan Kritis

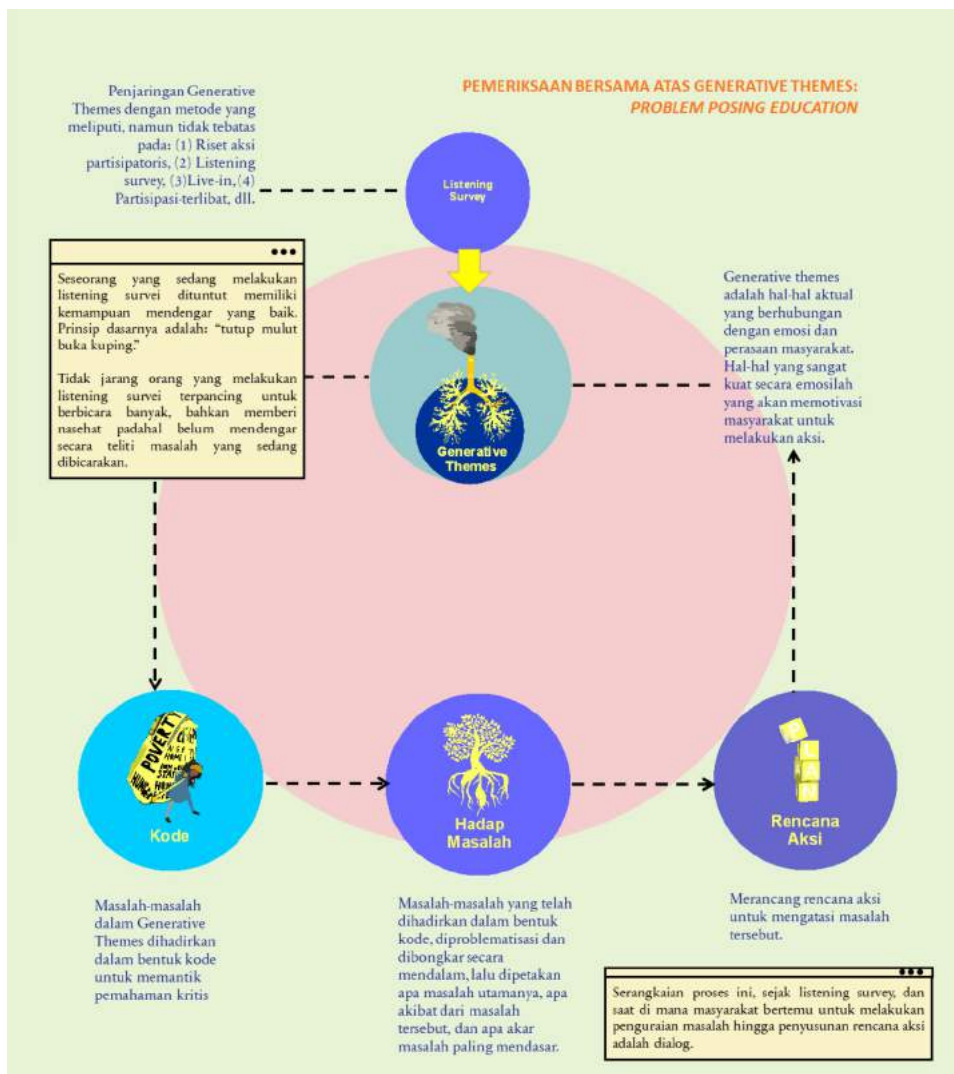
Berdasarkan visi pendidikan kritis di atas, Freire mengembangkan metode proses produksi pengetahuan dalam pendidikan kritis. Pendidikan hadap-masalah atau problem-posing education salah satu konsep utama proses produksi pengetahuan yang ia kembangkan. Hadap-masalah, sederhananya, adalah problematisasi realitas dengan meletakkan segala sesuatu di atas meja untuk didiskusikan, dibedah, dan dicari akar masalahnya dan apa dampak-dampaknya. Metode hadap-masalah bertujuan untuk secara kritis melihat realitas, yang dengan demikian juga bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis itu sendiri, yakni suatu konsientisasi. Melaluinya, peserta belajar diajak untuk mempertanyakan apa yang mereka alami, misalnya, di dalam masyarakat, hubungan kerja di pabrik, bahkan keluarga, dan kemudian menantang ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang berlangsung di sana.

Konsep lainnya ialah kode dan dialog. Pengajuan masalah di atas meja atau di dalam ruang belajar terjadi melalui proses pengkodean atas realitas. Kode adalah representasi dalam bentuk-bentuk sederhana atau simbol menggugah seperti drama, poster, film, gambar atau apa saja yang dihadirkan untuk memantik penyelidikan lebih dalam. Kode ini berfungsi untuk menampilkan ulang realitas dan untuk memicu peserta belajar menerjemahkannya secara kritis berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka atas realitas yang dikodekan. Realitas ini adalah tema-tema kehidupan yang berasal dari dimensi signifikan realitas kontekstual peserta belajar. Freire menyebut tema-tema ini sebagai *generative themes*. “*Generative themes* merupakan hal-hal aktual yang berhubungan dengan emosi dan perasaan masyarakat, yang akan memotivasi masyarakat untuk melakukan aksi.”⁸ Penjarangan *Generative Themes* datang dari keterlibatan langsung dengan kenyataan masyarakat dengan metode yang meliputi, namun tidak terbatas pada: (1) Riset aksi partisipatoris, (2) Listening survey, (3) Live-in, (4) Partisipasi-terlibat, dan lain-lain. Dalam serangkaian proses produksi pengetahuan ini, dialog menempati posisi yang memungkinkan

8 Kutipan ini diambil dari Modul Panduan Melakukan Pendidikan Kampung yang ditulis Abdullah El-Hawie.

semuanya berjalan dengan prinsip demokratis, yang tidak menjadikan proses belajar sebagai ruang bagi pendidikan satu arah dan penuh pemaksaan. Melalui dialoglah, peserta belajar “kemudian dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan karena itu meningkatkan kemampuan mereka untuk mengubah realitas.”

Ilustrasi serangkaian proses produksi pengetahuan Freire akan tampak sebagai berikut:



Rangkaian proses dari konsep produksi pengetahuan tersebut berada dalam dialektika simultan *aksi-refleksi* atau *praxis*. Menghadirkan masalah untuk lantas memproblematisasinya adalah kerja refleksi. Kerja refleksi yang bersamanya mensyaratkan untuk mengembangkan rencana aksi dan menjalankannya untuk mengubah realitas adalah kerja aksi. Rangkaian ini, refleksi-aksi atau aksi-refleksi merupakan kesatuan tak terpisah dan praktik terus menerus. Rangkaian proses ini merangsang untuk melakukan suatu aksi, kemudian merefleksikannya kembali, dan mengambil aksi baru yang lebih baik. Ia menjadi gerakan transformasi sosial, dan secara bertahap akan meluas. Bersamaan transformasi sosial, secara simultan di sisi lain, yakni pada level kesadaran, kemenyatuan aksi-refleksi akan mendorong kesadaran kritis, kapasitas berpikir dan kemampuan *integrasi*—kemampuan terlibat di dalam realitas dengan menyejarah dan kemampuan memilih untuk mengubahnya ke arah lebih baik—juga menjadi berkembang dan meluas. Serta “mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam, yakni ‘kesadarannya kesadaran’ (*the consice of the consciousness*)”⁹

Apa yang Freire bayangkan dari simultanitas dialektik aksi-refleksi adalah perubahan pada dua tataran sekaligus. Perubahan pada tataran subyektif dan pada realitas obyektif. Pada yang pertama berarti bahwa tumbuhnya kesadaran kritis. Pada yang kedua berarti perubahan realitas melalui tindakan transformatif yang mungkin terjadi jika dan hanya jika subyek memiliki kesadaran kritis. Dialektika simultan *aksi-refleksi*, dengan demikian, merupakan kunci pendidikan kritis sebagai proses konsientisasi dan gerakan transformasi sosial. Memisahkan aksi-refleksi, tidak menerapkannya dalam satu kesatuan, akan membawa pada pemujaan aktivisme atau jatuh ke dalam verbalisme tanpa tindakan nyata. Pemujaan aktivisme tanpa refleksi, tanpa proses produksi pengetahuan yang berseiringan dengannya, buta pada realitas dan tidak kritis, hanya jatuh pada ajakan “*Yang penting aksi*”. Sebaliknya, verbalisme semata tidak akan membawa perubahan apa pun, dan berujung pada kasak-kusuk “*Mana aksinya?*”. Pendidikan kritis menjembatani dua kutub pemujaan aktivisme dan verbalisme. Pendidikan kritis memadukan antara memikirkan dunia dan terlibat turun mengubah dunia.

9 Roem Topatimasang, “Memahami Filsafat Pendidikan Freire”, dalam Rahardjo, Toto, et, al., (eds), *Pendidikan Populer*, (Yogyakarta: ReaD Books, hasil kerjasama INSIST dan PACT Indonesia, 2000).

Prinsip Partisipatif Sajogyo

Senada dengan pendidikan kritis Paulo Freire, Prof. Sajogyo mengajukan Kaji-Tindak Partisipatif untuk membalik dehumanisasi. Fokus Sajogyo ialah menaikkan martabat golongan terlemah lapis bawah di pedesaan di mana dehumanisasi berdampak paling mematikan kepada mereka. Dalam lintasan sejarah rezim pembangunanisme negeri ini, mereka senantiasa tidak dimanusiakan dan menjadi objek penderita pembangunan. Mereka tidak dilibatkan secara partisipatif, bahkan dieksklusi dari aset produktif yang menjadi sumber penghidupan utama. Pengetahuan mereka tentang lingkungan hidup dan tentang apa yang terbaik bagi kelangsungan kehidupan mereka tidak diprioritaskan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan. Berpangkal pada kenyataan ini, Sajogyo mengimpikan pembangunan “dari bawah”, dari rakyat itu sendiri, dan ia mendorong Kaji-Tindak Partisipatif sebagai metode untuk mengorganisasi mereka mencapai cita-cita tersebut.

64

Kaji-Tindak Partisipatif juga lahir dari kegelisahan Sajogyo atas kecenderungan ilmu yang hidup di dunia konsep dan teori, “yang tanpa kembali ke realita, tanpa kembali ke praktik, atau aksi”. Sajogyo mendorong ilmu pengetahuan berjumpa dengan realitas melalui proses “dari praktik ke teori dan ke praktik berteori”. Yang di dalamnya mensyaratkan terjadinya hubungan dialektika tak pernah berhenti antara teori dan praktik, atau praktik dan teori, atau dalam istilah lain, lingkaran dialektika aksi-refleksi-aksi dan seterusnya. Aksi perlu dikritik dengan teori dan teori dikritisi dengan aksi. Tujuan besar dari dialektika ini adalah membongkar “dunia palsu” (*dechantment of the world*) dengan sekaligus diikuti usaha membangun “dunia bermakna bagi manusia” (*rechantment of the world*).¹⁰ Metode untuk mencapai dialektika dari praktik ke teori dan ke praktik berteori adalah Kaji-Tindak Partisipatif—atau dalam istilah lebih umum disebut *riset aksi partisipatoris*—dengan visi melahirkan ilmu yang berguna dan berpihak kepada golongan terlemah lapis bawah.¹¹

Kaji-Tindak Partisipatif adalah metode dalam kerja riset, di mana Sajogyo menerjemahkan riset menjadi proses belajar bersama dengan golongan terlemah lapis bawah. Prinsip utama Kaji-Tindak Partisipatif, karenanya, antara lain ialah (1) Belajar Bersama Bertindak Setara,

10 Francis Wahono, “Teori Terbentuk Karena Aksi” dalam pendahuluan buku *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi*, (Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2006), hlm. 1-3.

11 Surya Saluang, “Kaji Tindak: Komitmen Pada Golongan Lemah <https://www.ksi-indonesia.org/id/stories-of-change/detail/922-kaji-tindak-komitmen-pada-golongan-lemah>. Lihat juga, Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*, (Yogyakarta: Pustaka Ifada, bekerjasama Sajogyo Institute, 2011), hlm. 187-188.



Belajar Bersama
Bertindak Setara

-Sajogyo



yakni proses belajar dan bertindak bersama rakyat melalui proses aksi-refleksi yang terus menerus selama dan pada setiap tahapan kegiatan; (2) riset bukan untuk sekadar memahami suatu kenyataan, melainkan juga suatu aksi transformasi sosial yang dikerjakan secara “partisipatif” bersama rakyat; (3) ilmu dan pengetahuan bertujuan untuk pembebasan kesadaran sehingga karenanya harus bersifat kritis;¹² (4) kerja produksi pengetahuannya bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang memungkinkan rakyat secara kritis “menafsirkan realitas tempat mereka hidup sambil memperluas pembacaan mereka atas dunia”;¹³ dan (5) aksi-refleksi atau teori-praktik adalah kesatuan dalam proses. Ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire, di mana aksi saja tanpa refleksi melalui produksi pengetahuan yang memadai “akan terkesan naif dan bergerak tanpa kritik”. Refleksi saja tanpa aksi akan memisahkan pengetahuan dari realitas.

Untuk menerapkan Kaji-Tindak Partisipatif ini setidaknya terdapat dua hal penting untuk diperhatikan. Pertama, *partisipasi*. Dengan menukil Freire dan R. Chambers, ia memaknai “partisipasi” sebagai proses melibatkan orang-orang terlemah lapis bawah di pedesaan agar mampu “berbicara” soal nasib mereka masing-masing di kelompok kecil mereka. Ini berarti mengaplikasikan partisipasi sebagai praktik pengorganisasian dan transformasi rakyat. Pendidikan kritis, begitu pun Kaji-Tindak Partisipatif, menjadi partisipatif ketika melibatkan proses berorganisasi rakyat.¹⁴ Karenanya, Sajogyo mengatakan untuk meninggalkan gaya penelitian lama, baik sebagai penyuluh, surveyor dan lainnya, yang bertujuan menambang data atau memberi solusi-solusi teknis dan cepat. Ia menekankan agar peneliti berperan sebagai fasilitator atau organisator yang mendampingi setiap kegiatan rakyat.

Pendidikan dan Kaji Tindak juga menjadi partisipatif ketika berorientasi “hadap masalah” dan bertujuan untuk mengemansipasi di antar semua aktor. Bila tidak melahirkan aksi saling mengemansipasi ia akan menjerumuskan pada jalur cepat non-partisipatif.¹⁵ Ketiadaan partisipasi ini, bila semua bergantung pada fasilitator atau peneliti yang berkerja dengan “yang penting program riset selesai”, berpotensi menghadirkan solusi tambal-sulam atas masalah-masalah rakyat. Ini sekadar mendorong suatu perubahan reformatif belaka, bukan

12 Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*, (Yogyakarta: Pustaka Ifada, bekerjasama Sajogyo Institute, 2011), hlm. 186.

13 Sajogyo, “Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pemberdayaan” dalam *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi*, (Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2006), hlm. 122.

14 *Ibid*, hlm. 133.

15 Ahmad Nashih Luthfi, *Op. Cit*, hlm. 187-188.

perubahan transformatif, karena hanya fokus melunaskan program. Di mana solusi-solusi perubahan datang dari atas atau dari luar rakyat, tidak dari dalam rakyat sendiri.

Kedua, ketika Sajogyo menekankan bahwa metode Kaji Tindak Partisipatif adalah proses transformasi sosial dan pembebasan kesadaran, ia meletakkan proses demokratisasi pengetahuan sebagai syarat bagi metode ini. Sajogyo mengatakan bahwa penting untuk melakukan demokratisasi pengetahuan. Pengetahuan bukan lagi milik seorang profesional atau otoritas tertentu. Pengetahuan milik semuanya dan dalam proses produksi pengetahuan golongan terlemah di lapis bawah pedesaan adalah mitra setara.¹⁶ Demokratisasi pengetahuan ini menurut Sajogyo, sebagaimana ia kutip dari Andree Kark, dapat dicapai melalui prinsip berikut:¹⁷

1. Semua bentuk pengetahuan adalah valid dan semestinya berdampingan dalam hubungan dialogis satu sama lain.
2. “Keadilan antar pengetahuan” itu mencakup upaya memperkuat “suara mereka yang terkalahkan dan terpinggirkan”.
3. Pengetahuan dan teknologi tradisional jangan dimuseumkan.
4. Tiap warga adalah seorang ilmuwan dan tiap orang adalah ahli (*expert*).
5. Ilmu pengetahuan (*science*) mesti membantu setiap orang, laki-laki/perempuan.
6. Semua (cabang-cabang) ilmu mesti disatukan menjadi suatu “*heuristic*” yang positif untuk memperlancar dialog.

Dengan memegang penuh-seluruh “partisipasi” dan “demokratisasi pengetahuan” Kaji-Tindak Partisipatif ini, cita-cita untuk mendorong pembangunan dari bawah, dari sisi komunitas, dari sisi rakyat dapat terwujud. Proses transformasi sosial dan pembebasan kesadaran melalui proses dialektika “dari praktik ke teori dan ke praktik berteori” dalam Kaji-Tindak Partisipatif, rakyat akan menyadari realitasnya. Sehingga, mengutip Francis Wahono, rakyat “akan tidak mudah ditipu, ditindas, dipermiskin dan dimarginalisasi”.¹⁸ Gerakan untuk melakukan perubahan kemudian menjadi konsekuensi dari tumbuhnya kesadaran kritis ini.

16 Sajogyo, “Kerjasama Peneliti, Penyuluh, dan Petani” dalam *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi*, (Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2006), hlm. 151.

17 Sajogyo, “Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pemberdayaan” dalam *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi*, (Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2006), hlm. 129.

18 Francis Wahono, “Teori Terbentuk Karena Aksi” dalam pendahuluan buku *Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi*, (Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2006), hlm. 5.

Metode dan Prinsip Modul Pendidikan Kampung

Modul Pendidikan Kampung yang Anda pegang ini mengacu sepenuhnya pada metode pendidikan kritis Paulo Freire dan Kaji-Tindak Partisipatif Prof. Sajogyo untuk menumbuhkan kesadaran kritis di atas. Suatu kesadaran yang berujung pada aksi transformasi sosial dalam gerak dialektika simultan aksi-refleksi atau dalam lingkaran dialektik “dari praktik ke teori dan ke praktik berteori”. Sebab itu, dari pendidikan kritis Paulo Freire, Pendidikan hadap masalah, utamanya, menjadi koordinat bagaimana Modul Pendidikan Kampung diposisikan sebagai media proses belajar dalam memeriksa masalah rakyat. Dengan metode itu pula, Modul Pendidikan Kampung diposisikan sebagai media pengorganisasian rakyat.

19 Langkah-langkah melakukan Pendidikan Kampung ini secara lebih rinci silakan baca di Modul Pendidikan Kampung.

Metode pendidikan hadap masalah Freire dalam modul ini berkembang menjadi langkah-langkah sebagai berikut:¹⁹

1. Langkah pertama: Pemeriksaan atas *Generative Themes* melalui listening survey, riset aksi-partisipatoris, *live-in*, dan partisipasi-terlibat. Penekanannya di sini ada pada untuk mendalami pengalaman nyata dan berpihak kepada rakyat.
2. Langkah kedua: Belajar bersama mengkaji masalah dan akar masalah. Proses dalam langkah kedua ini menggunakan *six step* dan secara berurutan mencakupi: (a) Menghadirkan kode untuk representasi masalah, (b) Melakukan analisa pertama, (c) Merefleksikan kode dengan pengalaman nyata sendiri dan di sekitar, (d) Pengembangan masalah dengan melacak akibat-akibatnya secara sosial, ekonomi, dan budaya, (e) Menggali akar masalah, dan (f) Merancang rencana tindakan.
3. Langkah ketiga: Merumuskan syarat-syarat perubahan dan memulai tindakan kolektif. Detail langkah ketiga ini meliputi: (a) Merumuskan visi perubahan, (b) Memetakan sistem pendukung, seperti aliansi, kolaborasi, kooperasi, dan seterusnya, (c) Merumuskan rencana aksi, (d) Memetakan strategi dan taktik, dan (e) Aksi kolektif pembalikan krisis sosial-ekologis.
4. Langkah keempat: Memperluas praktik sosial melalui aksi-refleksi.

Sedangkan dari prinsip Kaji Tindak Partisipatif Prof. Sajogyo—yang menjadi pendekatan lembaga Sajogyo Institute, Modul ini menerjemahkan partisipasi dan keberpihakan pada golongan terlemah lapis bawah menjadi prinsip-prinsip berikut:

1. Kegiatan belajar dan bertindak bersama masyarakat mengupayakan tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan, mengolah, dan meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi masalah yang berkembang dalam diri dan lingkungannya.
2. Bertindak dan belajar bersama mengacu pada pengertian seluas-luasnya dan berprinsip bahwa perubahan yang diupayakan selalu mengutamakan kepentingan orang dalam daripada orang luar.
3. Pada aras jiwa, etika, dan prinsip, Kegiatan belajar dan bertindak bersama mendahulukan kepentingan masyarakat di mana ia digunakan.
4. Pada aras teknik kerja pemberdayaan masyarakat, kegiatan belajar dan bertindak bersama melakukan peninjauan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang sederhana dan berdayaguna praktis untuk berbagai tingkat kemampuan masyarakat.”²⁰

20 Sajogyo Institute, “Pendekatan Kaji Tindak” dalam <https://sajogyo-institute.org/pendekatan-kaji-tindak/>

Sejara bersama langkah-langkah dan prinsip di atas, Modul Pendidikan Kampung mensyaratkan enam prinsip dasar berikut untuk dipenuhi:

1. *Bekerja bersama, bukan bekerja untuk...:* Pendidikan sebagai pemberdayaan haruslah datang dari dalam pemahaman masyarakat akan kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat yang berhak memutuskan isu-isu untuk disasar, termasuk apa kebutuhan mereka dan bagaimana menghadapinya.
2. *Pendidikan adalah awal proses penyadaran:* Proses belajar untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak dasar mereka, dan untuk memahami kenyataan mereka secara kritis.
3. *Biarkan suatu komunitas untuk tumbuh:* Pendidikan adalah membangun manusia, membangkitkan kehotmatan dan martabat, dengan demikian mereka bisa membangun masa depan mereka sendiri. berangkat dari potensi yang dimiliki.
4. *Membangun solidaritas:* Proses belajar sebagai proses membentuk dan menguatkan solidaritas dengan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan cinta kasih.
5. *Membangun serikat atau organisasi masyarakat:* Proses belajar menjadi sarana untuk membangun dan memperkuat organisasi dalam rangka mempertajam perjuangan.
6. *Dialog:* Semua prinsip ini bersandar pada dialog, di mana semua orang mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat, didengar, menentukan keputusan. Tidak ada relasi hierakis.

Untuk mengakomodasi metode dan prinsip di atas, yang kami adaptasi dari Paulo Freire dan Prof. Sajogyo, Modul Pendidikan

Kampung berpegang pada spirit pendidikan kritis dan Kaji-Tindak Partisipatif sebagai proses pembebasan. Maka dalam prinsip, metode hingga teknis praktik Modul Pendidikan Kampung ini mensyaratkan spirit pembebasan itu sendiri. Modul Pendidikan Kampung tidak saja menekankan pembebasan dari struktur penindasan di luar proses belajar, melainkan juga mendorong transformasi relasi kuasa pengetahuan di dalam proses belajar agar tidak mereproduksi hubungan timpang dan tak adil.

Modul Pendidikan Kampung, untuk itu, pertama-tama, memasang rambu-rambu umum sebagai berikut: *Pertama*, proses belajar berfungsi untuk menciptakan ruang agar sikap kritis bisa muncul. Baik terhadap sistem dan struktur maupun terhadap diri sendiri. Dalam hal ini pendidikan kritis mengedepankan perspektif kelas, juga perspektif gender, untuk memahami ketidakadilan, untuk fokus pada relasi struktur sosial. Perspektif kelas dan gender akan membantu kebutuhan praktis mengubah posisi subordinat kelas dan gender terlemah. Dalam rangka mengaselerasi atas masalah sitemik, pendidikan kritis juga mempekerjakan pendekatan ekonomi-politik dan kritik ideologi.

70

Kedua, Proses belajar tidak pernah kedap dari “kuasa” yang bekerja di luar forum. Hegemoni kultural dan politik serta dominasi kuasa di luar ruang belajar sangat mungkin merasuk ke dalam proses belajar. Sangat mungkin peserta belajar, misalnya, seorang ibu dengan pengalaman mendapat perlakuan KDRT sehingga enggan bicara karena satu forum dengan suaminya. Sangat mungkin mayoritas peserta belajar takut mengemukakan pendapat karena seorang kaya lokal atau tokoh masyarakat berpengaruh ikut hadir dalam ruang belajar. Meninmbang betapa contoh tersebut berpeluang besar terjadi, fasilitator proses belajar perlu sensitif atas masuknya hegemoni dan dominasi baik berdasarkan kelas, gender, ras, dan generasi. Ruang belajar dengan demikian berfungsi untuk menciptakan ruang non-diskriminatif dan fasilitator mesti tetap mengupayakan ruang demokratis.

Ketiga, dalam proses belajar fasilitator perlu sensitif terhadap kecenderungan takut akan kebebasan (*fear of freedom*) di dalam diri peserta belajar. Freire mengingatkan bahwa kaum tertindas

mempunyai dua kemungkinan. Pertama, pengalaman berada di bawah ketertindasan sepanjang hayat menyebabkan kaum tertindas mengalami rasa takut menjadi bebas, atau kedua, justru mendorong mereka mengimajinasikan diri ideal adalah diri sang penindas.

Keempat, proses belajar menjadi ruang pertama mempraktekkan hubungan setara antara fasilitator-peserta belajar sebagai relasi subjek-subjek. Semua memiliki kuasa untuk mengatur bagaimana proses belajar akan berlangsung, sekaligus memastikan tidak terjadi pembentukan hubungan kuasa baru, terutama pemusatan kuasa di dalam diri fasilitator. Dalam banyak sekali penyelenggaraan pendidikan sering terjebak menjadikan peserta belajar sebagai obyek. Fasilitator menjelma tiran baru yang mendominasi ruang belajar. Modul Pendidikan Kampung ini tidak saja ingin membebaskan dari resapan “kuasa” di luar forum belajar, tapi juga mengangankan transformasi relasi kuasa pengetahuan di dalam proses belajar agar tidak mereproduksi hubungan timpang antara fasilitator dan peserta belajar. Bahkan antara peserta belajar dengan peserta belajar lainnya.

Kelima, proses belajar bertugas untuk memastikan bagaimana kekuasaan bisa dilihat dan dirasakan agar upaya-upaya merancang aksi perubahan dapat dilakukan. Dalam hal ini Ben K. Lakasana menulis, “[...] kekuasaan bekerja dengan sangat baik ketika tidak terlihat. Maka untuk menantang hegemoni kekuasaan, apa yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana membuat kekuasaan menjadi tampak dan dapat diskusikan secara gamblang, tetapi juga bagaimana agar hegemoni bisa dirasakan, dipahami, dan disadari konsekuensinya, sehingga akhirnya memunculkan upaya-upaya baru untuk mencapai demokrasi egalitarian. Intinya, hegemoni perlu dipahami dan dibuat menjadi tampak, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui keterbukaan terhadap kedalaman permasalahan-permasalahan sosial di sekitar kita dan pembelajaran langsung dalam keseharian mengenai isu-isu sosial ini.”²¹

21 Ben K. Laksana, “Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Demokratis (1): Terbuka akan Kelemahan”, *Indoprogress*, 14 Oktober 2020. Lihat, <https://indoprogress.com/2020/10/prinsip-prinsip-dasar-pendidikan-demokratis-1-terbuka-akan-kelemahan/>

Penutup: Konsientisasi untuk Pengorganisasian Rakyat

Modul Pendidikan Kampung yang Anda pegang ini, pada akhirnya, merupakan suatu metode pengorganisasian rakyat. Suatu pengorganisasian beralas konsientisasi, proses untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan menubuhkan *praxis*: dialektika simulatan aksi-refleksi. Metode pendidikan hadap-masalah menjadi sarana bagi proses konsientisasi, yang segera bersamanya juga menjadi sarana pengorganisasian. Pengorganisasian dengan pendidikan kritis ini mendorong transformasi pengetahuan dan demokratisasi. Keduanya penting untuk membangun landasan bagi gerakan sosial agar tidak terjerembab ke dalam revolusi yang hanya menguntungkan elit-individu, atau menjauhkan gerakan dari personalisasi ke dalam satu sosok. Pengorganisasian berbasis pendidikan kritis, dengan demikian, akan melahirkan (1) gerakan yang sangat memberi penekanan pada demokrasi akar rumput dan otoritas non-hierarkis; (2) gerakan yang menghidupkan peran agensi ketika pemusatan perjuangan secara struktural dan formal mematakannya; dan (3) gerakan yang berorientasi pada perlawanan atau *counter*-hegemoni atas struktur budaya dan kuasa dominan.

72

Tetapi, Seehwa Cho menyatakan bahwa pada dua yang terakhir memiliki tantangan atau, katakanlah, dilema internal. Fokus berlebih pada gerakan kultural akan membawa terjebak mengorek politik-pengetahuan, bahasa, representasi, wacana, dan ideologi, lantas melupakan isu mendasar seperti ekonomi. Sementara fokus semata untuk menghidupkan peran agensi dapat jatuh ke dalam pemujaan berlebih atas bentuk perlawanan sehari-hari dan kecil dan daripada perubahan sistematis atau institusional.²² Betapa pun dapat diperdebatkan, catatan Chow berharga bagi kerja pengorganisasian rakyat berbasis pendidikan kritis.

Catatan lain ialah penting pula untuk menginsafi bahwa kerja “pengorganisasian” itu teramat luas. Pendidikan kritis satu bagian saja dari sekian macam kerja pengorganisasian. Bahkan pengorganisasian pun salah satu rangkaian dari kerja gerakan perlawanan lainnya, yakin kampanye dan advokasi hukum.²³ Di dalam kerja pendidikan kritis, modul ini juga satu bagian dari upaya memberi panduan bagi penerapan pendidikan kritis. Sungguh pun demikian, substansi

22 Seehwa Cho, “Politics of Critical Pedagogy and New Social Movements” dalam *Educational Philosophy and Theory*, Vol. 42, No. 3, 2010.

23 Tiga rangkaian kerja gerakan perlawanan berada di tiga rangkaian, yakni (1) Kampanye, (2) Advokasi hukum, dan (3) Pengorganisasian.

pendidikan kritis, yakni *konsientiasi*—proses menumbukan kesadaran kritis, merupakan substansi pengorganisasian. Kemampuan mengenali, memahami dan menganalisis dengan kritis kenyataan sosial adalah titik berangkat pengorganisasian. Sebagaimana kata Roem Topatimasang, “Mengorganisir rakyat sebenarnya adalah suatu akibat logis saja dari analisis tentang apa yang terjadi dalam masyarakat kita secara menyeluruh.”²⁴

Maka tepat di sini pendidikan kritis menemukan signifikansinya di tengah kebutuhan membangun gerakan sosial. Pendidikan kritis merupakan undangan untuk terlibat dalam perubahan sosial agar rakyat tidak tetap berada dalam kondisi tertindas dan hanya “mewujudkan harapan-harapan orang lain”. Pendidikan kritis adalah panggilan agar menyelami secara kritis perubahan sosial, sebab, kata Freire, “bila ia (baca: rakyat) tidak memiliki kemampuan menyelami *pertanyaan* perubahan-perubahan yang terjadi, ia akan menjadi bidak catur yang akan dipertandingkan perubahan-perubahan itu.”²⁵

24 Tan, Jo Hann & Roem Topatimasang, *Mengorganisir Rakyat*, (Yogyakarta, Insist Press, Cet. Ke-2, 2004), hlm. 3.

25 Paulo Freire, *Pendidikan Yang Membebaskan*, hlm. 6-7.

Daftar Bacaan

- Rahardjo, Toto, et, al., (eds). Pendidikan Popular. (Yogyakarta: ReaD Books, hasil kerjasama INSIST dan PACT Indonesia, 2000).
- Freire, Paulo. Pendidikan yang Membebaskan, terj. Martin Eran. (Jakarta: Melibas, 2001).
- , Pendidikan Kaum Tertindas, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008).
- Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy, Vol. I, (London: Penguin Book, 1976).
- Ranciere, Jacques. The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation. (Standford: Standford University Press, 1991).
- Cho, Seehwa. "Politics of Critical Pedagogy and New Social Movements", (Educational Philosophy and Theory, Vol. 42, No. 3, 2010).
- 74 Laksana, Ben K. "Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Demokratis (1): Terbuka akan Kelemahan", Indoprogres, 14 Oktober 2020.
- Sajogyo Institute, "Pendekatan Kaji Tindak" dalam <https://sajogyo-institute.org/pendekatan-kaji-tindak/>
- Sajogyo. Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi, (Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2006).
- Saluang, Surya. "Kaji Tindak: Komitmen Pada Golongan Lemah" <https://www.ksi-indonesia.org/id/stories-of-change/detail/922-kaji-tindak-komitmen-pada-golongan-lemah>
- Luthfi, Ahmad Nashih. Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. (Yogyakarta: Pustaka Ifada, bekerjasama Sajogyo Institute, 2011).

